

SKRIPSI

PERDAGANGAN KARET INDONESIA – CHINA DALAM KERANGKA *ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT* (ACFTA) TAHUN 2013-2017



ITA

1810521001

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

PERDAGANGAN KARET INDONESIA – CHINA DALAM KERANGKA *ASEAN – CHINA FREE TRADE AGREEMENT* (ACFTA) TAHUN 2013-2017



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

ITA
1810521001

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022

SKRIPSI**PERDAGANGAN KARET INDONESIA – CHINA DALAM
KERANGKA ASEAN- CHINA FREE TRADE AGREEMENT
(ACFTA) TAHUN 2013-2017**

disusun dan diajukan oleh

ITA

1810521001

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

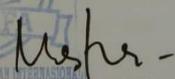
Makassar, (23 Agustus 2022)

Pembimbing,



Achmad, S.IP., M.Si.
NIDN: 0919047402

**Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar**



Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

SKRIPSI

PERDAGANGAN KARET INDONESIA – CHINA DALAM KERANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA)

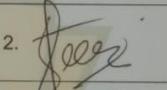
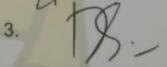
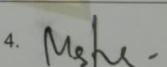
TAHUN 2013-2017

disusun dan diajukan oleh

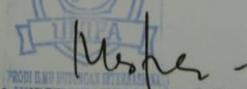
ITA
1810521001

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal (23 Agustus 2022) dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji,

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Achmad, S.IP., M.Si. NIDN: 0919047402	Ketua	1. 
2.	Dr. Syamsul Asri, S.IP., M.Fil.I. NIDN: 0926028502	Sekretaris	2. 
3.	Kardina, S.IP., M.A. NIDN: 0922068103	Anggota	3. 
4.	Andi Meganingratna, S.IP., M.Si. NIDN: 0931108002	Anggota	4. 

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar


Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ita
NIM : 1810521001
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"PERDAGANGAN KARET INDONESIA – CHINA DALAM KERANGKA ASEAN – CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA) TAHUN 2013-2017"** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU. No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 23 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Ita

PRAKATA

Puji dan syukur yang sangat besar penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Yesus Kristus yang selalu memberikan berkat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Pada dasarnya penyusunan skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan bagi mahasiswa Universitas Fajar Makassar dalam rangka penyelesaian studi.

Pada penulisan skripsi ini terdapat banyak hambatan yang penulis hadapi, namun berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga akhirnya, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus untuk segala kemudahan, penyertaan serta kelancaran yang selalu diberikan kepada penulis,
2. Kedua orang tua (bapak Tabba' dan ibu Ida Limbongan) serta kepada ketiga saudara-saudara penulis (Johan Tabba', Tandi Tabba', dan Tia Tabba'), yang selalu menjadi pendorong dan semangat penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dan atas segala kasih sayang, doa, pengorbanan serta dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan semua proses perkuliahan dengan baik dan lancar,
3. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, SE.M.Si selaku Rektor Universitas Fajar Makassar,
4. Ibu Dr. Hj Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Makasar serta jajaran-jajarannya,

5. Ibu Andi Meganingratna, S.IP., M.Si, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Fajar Makassar, yang selalu rendah hati dalam membantu penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan segala ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Bapak Achmad, S.IP., M.Si, sebagai Penasehat Akademik dan pembimbing skripsi penulis, yang telah mengarahkan dan selalu sabar dalam membimbing penulis selama proses perkuliahan sampai penyusunan skripsi dengan baik dan lancar,
7. Para dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Fajar Makassar (bapak Dede Rohman, S.IP., M.Si, bapak Dr. Syamsul Asri, S.IP., M.Fil.I, ibu Kardina, S.IP., M.A. dan beberapa dosen lainnya) yang telah berbaik hati dalam berbagi ilmu serta pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan sampai selesai,
8. Kakanda Afika Nur, S.H.Int sebagai *staff* Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Fajar Makassar yang selalu sabar dalam membantu penyusunan skripsi penulis,
9. Teman terdekat Fatria Windi Pakan, Heztya Palungan, Bintang R. Rumahorbo, Delfrian, Wandy Somalinggi, Andre Marselinus, Marulia Ponglabba, Amel Martins, Maurids Clary Joshua, Alex Tanan, Aan R. Dalimu dan sepupu penulis Leonardo Massolo, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, mendengar keluh kesah penulis, menjadi penghibur dan selalu membantu penulis dalam hal apapun,
10. Teman seperjuangan dari maba Andreyus Patasik, Andi Hasmaul Husna, Evy Aprilia, Jasri Hamzah, Ruth Wihelmina, Windy Krusita Paerunan dan teman-teman Neoliberalisme yang tidak disebutkan penulis satu persatu,

terima kasih atas segala dukungan dan bantuan serta suka maupun duka yang telah kita lewati kurang lebih selama 4 tahun,

11. SMTown Family, yang selalu menjadi penghibur penulis selama proses penyusunan skripsi,
12. *Internet and Google Chrome, thank you so much because of you're this thesis can be completed easily and smoothly,*
13. *Special thank's too my self because you survived until now, you really did great well, I love you and keep fighting! ☺*
14. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi ini yang belum disebutkan penulis satu persatu.

***“Patience, Trust and keep Fighting,
Thank You So Much and Gob Bless”***

ABSTRAK**PERDAGANGAN KARET INDONESIA – CHINA DALAM KERANGKA
ASEAN – CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA)
TAHUN 2013-2017****ITA
ACHMAD**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ACFTA dalam perdagangan karet Indonesia ke negara China serta kontribusi perdagangan karet terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini berfokus pada perdagangan karet Indonesia-China setelah ACFTA tahun 2013-2017. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, teknik analisis data menggunakan analisis *framing* serta menggunakan konsep perdagangan internasional dengan rezim internasional dan teori keunggulan komparatif. Maka hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah diterapkan peran ACFTA dengan adanya upaya membentuk peningkatan kerjasama negara-negara anggota ASEAN dengan negara China, yaitu program *Early Harvest* pembebasan tariff 0% tidak terlalu efektif terhadap perdagangan karet Indonesia ke China dari tahun 2013-2017 karena belum memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap ekspor karet Indonesia ke negara China dan cukup berkontribusi terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia.

Kata kunci : *ACFTA, Indonesia-China, Rezim Internasional, Perdagangan Karet*

ABSTRACT**INDONESIA – CHINA RUBBER TRADE IN ASEAN – CHINA FREE TRADE
AGREEMENT (ACFTA) FRAMEWORK
2013 – 2017****ITA
ACHMAD**

This research is aimed to know ACFTA role in Indonesia rubber trade to China as well as the rubber trade contribution toward Economy Growth of Indonesia. This research focused on Indonesia – China rubber trade after ACFTA 2013-2017. Therefore, this research used descriptive qualitative research method, framing analysis of the data technique analysis, and international trade concept with the international regime and comparative advantage theory. Then the results of this study indicated that after the implementation of ACFTA role with the effort to form an increase in cooperation between ASEAN member countries and China, which is the Early Harvest program of 0% tariff exemption, it is ineffective for Indonesian rubber trade to China from 2013-2017 because It has not had a very significant impact on Indonesia rubber exports to China and has contributed enough to Indonesia export growth

Keywords: ACFTA, Indonesia – China, International Regime, Rubber Trade.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis	9
1.4.2 Kegunaan Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Konsep dan Teori.....	10
2.1.1 Teori Keunggulan Komparatif	13
2.1.1.1 Konsep Perdagangan Bebas	20

2.1.2 Konsep Rezim Internasional.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Rancangan Penelitian	33
3.2 Kehadiran Peneliti	34
3.3 Lokasi Penelitian	34
3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5 Analisis Data	35
3.6 Tahap-tahap Penelitian	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Peran ACFTA terhadap Perdagangan Karet Indonesia ke China Tahun 2013-2017	39
4.1.1 Upaya Kerjasama Program <i>Early Harvest</i>	53
4.2 Kontribusi Perdagangan Karet Indonesia-China tahun 2013- 2017 terhadap Pertumbuhan Ekspor Indonesia dalam Kerangka ACFTA.....	57
4.2.2 Perkembangan Ekspor Karet Indonesia ke China Tahun 2013-2017	63
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	

DAFTAR GRAFIK

4.1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDB Indonesia tahun 2013-2017	61
4.2	Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDB Indonesia tahun 2013-2017	62
4.3	Perkembangan Ekspor Karet Alam Indonesia Ke China Tahun 2013-2017	67
4.4	Perkembangan Ekspor Karet Sintetis Indonesia Ke China Tahun 2013-2017	69
4.5	Nilai Tukar Rupiah Terhadap Yuan	74

DAFTAR TABEL

4.1	Perkembangan Ekspor Karet Alam dan Karet Sintetis Indonesia ke China Tahun 2006-2017	51
4.2	Perbandingan Nilai Ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Karet tahun 2013-2017	58
4.3	Jumlah Produksi Karet Alam Indonesia Menurut Provinsi tahun 2013-2017	64
4.4	Volume Ekspor Karet Alam Indonesia menurut Negara Tujuan tahun 2013-2017	65
4.5	Volume Ekspor Karet Sintetis Indonesia menurut Negara Tujuan tahun 2013-2014	66
4.6	Hasil Penghitungan Ekspor Karet Alam Negara Pesaing Utama ke Negara China Tahun 2013-2015	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu produk dari hasil perkebunan Indonesia yang menjadi produk ekspor Indonesia ke negara lain adalah Karet. Meskipun banyak tanaman lain seperti *artichoke*, *chamomile*, sawi putih, *dandelion*, *escarole*, selada, bunga matahari, tanaman tiram, *tarragon hop*, ganja, *hackberry*, *poinsettia*, buah ara, murbei, *Osage-oranye*, pohon beringin dan lain-lain yang juga menghasilkan lateks, pohon karet adalah yang paling efisien dalam memproduksi karet, yang membuat menjadi pemasok lateks untuk 99% karet. Karet memiliki kelenturan dan kekuatan, karet salah satu jenis yang paling fleksibel, dan tahan terhadap air dan bahan kimia tertentu. Juga tahan terhadap pemotongan, robek, kekuatan tarik tinggi dan mudah menempel pada bahan lain¹. Beberapa keuntungan atau manfaat karet yaitu relatif murah untuk diproduksi, tahan terhadap panas yang tinggi, tahan air, mudah dirawat tahan lama dan lain-lain. Karet dapat di produksi menjadi pakaian dan alas kaki atau tali jam tangan, bola, sepatu, karet gelang, sarung tangan, ban dan lain sebagainya yang dapat dibuat dari karet.

Indonesia menjadi negara kedua di dunia yang menghasilkan karet terbanyak. Produk karet Indonesia lumayan diminati oleh negara lain. Hal ini dibuktikan dengan berbagai negara didunia yang menjadi tujuan ekspor karet Indonesia, Negara –negara tersebut diantaranya seperti Amerika

¹ Sri Lanka export development board, 'Benefits and Uses of Natural Rubber - EDB Sri Lanka', 2021 <<https://www.srilankabusiness.com/blog/uses-advantages-of-natural-rubber.html>>.

Serikat, Jepang, China, Malaysia, Australia, Hong Kong, Jerman dan lain-lain².

Seperti yang kita ketahui setiap negara di dunia memiliki keunggulan komparatif yang berbeda-beda. Untuk itulah negara-negara bekerja sama untuk saling melengkapi kebutuhan suatu negaranya dengan cara melakukan ekspor impor. Ekspor dan impor membantu suatu negara tumbuh. sebagai komponen perdagangan, mereka menganggap penting dalam kebijakan diplomatik dan luar negeri. Negara mengekspor barang dan jasa di mana mereka memiliki keunggulan kompetitif atau komparatif. Pemerintah mendorong ekspor karena mereka meningkatkan pendapatan, pekerjaan, cadangan mata uang asing, dan likuiditas. Negara akan mengimpor suatu kebutuhan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan yang kurang di negaranya dan bukan hanya negara mengimpor yang mendapatkan keuntungan tetapi juga negara yang mengekspor dengan cara dapat meningkatkan pendapatan suatu negaranya. Ada berbagai macam jenis produk yang dapat di impor oleh suatu negara mulai dari impor produk migas dan non migas. Migas merupakan produk hasil tambang berupa minyak dan gas. Sedangkan non migas merupakan produk hasil perkebunan, perikanan, industri, dan produk tambang selain migas.

Perdagangan internasional adalah jenis pertukaran yang diselesaikan oleh penduduk suatu negara dengan penghuni dari negara yang berbeda berdasarkan pengaturan yang disepakati bersama. Perdagangan internasional pada umumnya adalah kegiatan yang dilakukan dengan menjual produk atau barang tertentu dari dalam negeri untuk dimasukkan

² ana septiani, Skripsi 'Kerjasama Indonesia-Jepang Melalui IJEPA Dalam Ekspor Karet Pada Tahun 2016-2019', 2018.

kenegara lain³. Dengan adanya perdagangan internasional negara-negara dapat dengan mudah melakukan sebuah transaksi ekspor ke negara lain dengan keunggulan komparatif yang dimiliki suatu negara untuk mendapatkan keuntungan ekonomi bagi negaranya.

Seiring dengan berkembangnya zaman banyak negara-negara yang membuat organisasi regional yang berada dikawasan yang sama untuk saling bekerjasama dalam berbagai bidang dan dengan tujuan juga untuk memajukan area kawasan tersebut. Pendekatan yang terus-menerus antar negara tetangga yang berada di kawasan yang sama memiliki keadaan alam yang relatif sama, hal tersebut juga yang mendorong untuk saling bekerjasama antar sesama negara di suatu kawasan tersebut. Dengan adanya organisasi regional diharapkan dapat berperan lebih efektif dan berdampak luas, seperti sesuai dengan kesepakatan bersama bagi para negara-negara yang berada dikawasan tersebut⁴.

Untuk memperbaiki atau meningkatkan kerja sama antara anggota negara – negara Asia Tenggara (*The Association of Southeast Asian Nations/ASEAN*) dengan negara China mereka mengawali dengan menandatangani sebuah kerangka kesepakatan kerjasama Ekonomi ASEAN – China pada tahun 2002. Kemudian perjanjian ini dikembangkan menjadi *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)* dan mulai diberlakukan pada tahun 2010. Perjanjian ini melingkupi penurunan tariff, bea masuk, dan

³ Ria Muslika and Novi Diana Badrut Tamami, 'Daya Saing Komoditas Ekspor (Karet) Indonesia Ke China', *Agriekonomika*, 8.2 (2019), 194–205 <<https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v8i2.5426>>.

⁴ A. Masyhur Effendi, 'Mengenal Organisasi Regional Lewat Kesepakatan Regional', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 16.6 (2017), 600 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol16.no6.1233>>.

pajak. Perjanjian ini berlaku bagi semua negara anggota ASEAN sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama⁵.

Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN otomatis juga akan terlibat dalam perjanjian ASEAN dengan China yaitu ACFTA⁶. Hubungan perdagangan yang dibangun bersama Indonesia dan China dapat diartikan sebagai tanda bahwa kedua negara menganggap hubungan ekonomi sebagai salah satu yang paling penting. Pembentukan perdagangan langsung antara kedua negara pada tahun 1985 dan peningkatan hubungan ekonomi antara kedua negara setelahnya dapat dianggap sebagai bagian dari upaya mereka untuk mengintegrasikan ekonomi mereka dengan ekonomi global yang sedang berkembang. Pembentukan perdagangan merupakan sebuah langkah yang diperlukan menuju hubungan diplomatik penuh. Dari perspektif Indonesia, China dianggap memiliki potensi ekonomi yang besar dan karenanya, dalam perekonomian dunia yang semakin terintegrasi, tidak bisa lagi diabaikan begitu saja⁷.

Indonesia dan China bekerjasama dalam berbagai bidang, mulai dari bidang keuangan, bidang maritim, bidang ekonomi, bidang industri dan lain sebagainya. Kerjasama dilakukan untuk memenuhi kebutuhan negara masing-masing dengan melalui perdagangan atau ekspor impor. Produk-produk ekspor Indonesia ke China rata-rata berasal dari alam seperti migas dan non-migas. Sedangkan yang menjadi impor Indonesia dari negara China adalah alat-alat elektronik. Salah satu ekspor unggulan Indonesia ke China adalah ekspor non-migas seperti sektor pertanian, khususnya subsektor

⁵ Tjarsonoldjang wita silvia, 'Dampak Kerjasama ACFTA Terhadap Ekspor Karet Indonesia-China (2010-2011)', 2011.

⁶ Raymond Atje and Arya B Gaduh, *Indonesia-China Economic Relations: An Indonesian Perspective*, *Economics Working Paper Series*, 2015, WPE052.

⁷ Atje and Gaduh, WPE052. *Ibid*

perkebunan. Subsektor perkebunan yaitu seperti kelapa sawit, kopi, kelapa, karet, teh, cengkeh dan lain sebagainya. Dan subsektor perkebunan yang menjadi salah satu unggulan ekspor Indonesia ke China adalah karet.

Salah satu tujuan Indonesia melakukan ekspor karet China adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan China mengimpor karet dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bahan dasar pembuatan produk dari karet, dikarenakan produksi karet di negara China hanya dalam jumlah yang sedikit. Karet yang dieskpor ke China yaitu karet alam dan karet sintetis. Karet alam adalah karet yang diperoleh langsung dari tanaman karet dan karet sintetis adalah karet buatan.

Sebelum adanya perjanjian ACFTA dengan adanya biaya tarif, pertumbuhan ekspor karet Indonesia ke China lebih kecil. Sehingga ekspor karet alam maupun karet sintetis Indonesia ke China sebelum penandatanganan perjanjian ACFTA dari periode 2000-2009, ekspor karet Indonesia ke China selalu menunjukkan kondisi yang fluktuatif atau perubahan naik turunnya volume ekspor. Seperti misalnya pada tahun 2002 karet alam turun sebanyak 46.221 ton, akan tetapi pada tahun 2003 naik kembali menjadi 107.724 ton. Dan pada tahun tahun 2008 mengalami penurunan sebanyak 22.180 ton, akan tetapi dapat meningkat kembali pada tahun 2009 sebanyak 138.277 ton⁸, salah satu penyebab turunnya ekspor karet Indonesia ke China pada tahun 2008 karena pada saat itu terjadi krisis keuangan global yang berdampak terhadap bidang ekonomi didunia.

Sama halnya dengan karet sintetis pada tahun 2006 jumlah ekspor mencapai 18.371, mengalami peningkatan pada tahun 2007 dengan jumlah

⁸ wita silvia. *Ibid*

total ekspor sebanyak 21.684, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2008 sampai 2009 dengan masing-masing jumlah ekspor yaitu 7.912 ton dan 4.991 ton, hal disebabkan karena terjadinya krisis keuangan global.

Karet merupakan salah satu hasil perkebunan yang memiliki peran atau manfaat yang sangat penting bagi sebuah negara. Karet bisa menjadi sebuah sumber pendapatan bagi negara, memberikan kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan bagi yang membutuhkan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi baru di sekitar daerah perkebunan karet, pelestarian lingkungan dan sumber daya hayati. Tanaman karet merupakan salah satu tanaman yang tumbuh subur di Indonesia. Pada tahun 2009 Indonesia memproduksi karet sebesar 2,4 juta ton dan berada di urutan kedua didunia sebagai penghasil karet, kemudian Thailand menempati urutan pertama dengan memproduksi karet sebanyak 3,1 juta ton, sedangkan Malaysia di urutan ketiga dengan memproduksi karet 951 ributon. Padahal luas kebun karet Indonesia adalah yang terluas didunia, yaitu seluas 3,40 juta ha, sedangkan Thailand hanya seluas 2,67 juta ha dan Malaysia dengan 1,02 juta ha⁹. Hal ini kita dapat ketahui bahwa produktivitas perkebunan karet Indonesia masih tertinggal dibanding dengan negara pesaing utama, Thailand.

Sektor pertanian juga merupakan salah satu produk unggulan Indonesia yang sangat bermanfaat untuk menghasilkan devisa negara dan pertumbuhan perekonomian. Hal ini terlihat dari komitmennya terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) yang sekitar 15,34 persen pada tahun 2010. Selanjutnya pada tahun 2011 komitmennya terhadap produk domestik bruto

⁹ wita silvia. *Ibid*

sangat besar, yaitu sekitar 14,72 persen atau berada di urutan ketiga setelah bursa, penginapan dan restoran¹⁰.

Salah satu subkawasan yang memiliki potensi yang sangat besar adalah subkawasan perkebunan. Meskipun pembayaran subkawasan perkebunan terhadap produk domestik bruto pembayarannya tidak terlalu besar, yaitu sekitar 2,11 persen pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 sekitar 2,07 persen atau merupakan posisi ketiga dalam bidang pertanian setelah panen dan sub-area perikanan, namun sub-area ini adalah pengaturan komponen yang tidak dimurnikan untuk area modern, mempertahankan pekerjaan dan memperoleh perdagangan asing¹¹.

Penelitian ini membahas perdagangan ekspor karet Indonesia-China setelah penandatanganan *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)* periode tahun 2013-2017. Akan tetapi dalam ekspor karet Indonesia, tidak terlepas dari berbagai masalah-masalah yang muncul terkait aktivitas ekspor karet tersebut. Selama periode tahun tersebut menjadi periode ekspor tertinggi karet alam ke China pada tahun 2013 dan terendah pada tahun 2015 dari tahun 2000-2017. Sebagai contoh faktor penyebab ekspor karet Indonesia ke China yaitu harga karet domestik dan harga karet internasional, sehingga menjadi pertimbangan bagi Indonesia dalam mengekspor produk karet karena sangat berhubungan dengan harga karet. Dan hal ini juga menarik bagi penulis untuk diteliti.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, perlu untuk diteliti lebih lanjut mengenai "Perdagangan Karet Indonesia-China

¹⁰ wita silvia. *Ibid*

¹¹ wita silvia. *Ibid*

dalam Kerangka *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) Tahun 2013-2017”.

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

1.2.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas serta fakta bahwa ekspor karet dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekspor Indonesia, maka penulis lebih terfokus pada perdagangan karet Indonesia-China setelah kesepakatan perjanjian *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) dalam kurun waktu dari tahun 2013-2017. Yang menjadi periode jumlah ekspor tertinggi karet alam dan karet sintetis Indonesia ke China.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas tentang ekspor karet Indonesia ke China, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran ACFTA dalam perdagangan karet Indonesia ke China dari tahun 2013 – 2017 ?
2. Bagaimana kontribusi perdagangan karet terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia dari tahun 2013 – 2017 dalam kerangka ACFTA ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah diajukan, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau mengetahui peran ACFTA dalam perdagangan karet Indonesia ke China yang telah disepakati oleh semua anggota negara

ASEAN dan China, dan untuk mengetahui kontribusi perdagangan karet terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia. Selain itu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah kesepakatan perjanjian ACFTA dapat menguntungkan bagi kedua negara tersebut.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat mengarahkan peneliti atau penulis dalam mengumpulkan data tentang konsep perdagangan bebas, konsep rezim internasional dan teori keunggulan komparatif sebagai sarana aktor hubungan internasional untuk bekerja sama dan mencapai kepentingan nasional suatu negara. Adapun dari konsep dan teori tersebut dapat memberikan informasi dan menjadi bahan kajian bagi para akademisi terkhususnya mahasiswa yang berada dalam dunia pendidikan baik itu program Studi Ilmu Hubungan Internasional maupun diluar program studi tersebut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai bahan pembelajaran bagi setiap orang yang ingin mengetahui atau ingin mempelajari lebih menyeluruh tentang perdagangan karet Indonesia ke China khususnya dalam kerangka ACFTA untuk keuntungan perekonomian bagi negara Indonesia dan memenuhi kebutuhan negara China. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui manfaat dari penelitian mengenai perdagangan karet Indonesia ke China dalam kerangka ACFTA.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tradisi liberal dalam hubungan internasional erat kaitannya dengan kebangkitan negara liberal modern. Filsafat liberal, dimulai dengan John Locke pada abad ke-17, melihat potensi besar bagi kemajuan manusia dalam *civil society* dan ekonomi kapitalis modern, yang keduanya dapat berkembang di negara yang menjamin kesempatan individu. Modernitas menciptakan kehidupan baru dan lebih baik, bebas dari pemerintahan otoriter dan kekayaan atau kesejahteraan materi yang jauh lebih besar¹².

Kaum liberal sebagian besar memiliki perspektif positif tentang naluri manusia. Mereka memiliki keyakinan luar biasa pada otak manusia dan menerima bahwa standar yang berkepal dingin dapat diterapkan pada masalah global. Liberal menganggap bahwa orang pada umumnya egois dan mencari sesuatu hal. Bagaimanapun, mereka juga menerima bahwa orang memiliki kepentingan yang beragam dan oleh karena itu dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang kooperatif dan menyenangkan di dalam dan di luar negeri, yang membawa manfaat luar biasa bagi semua orang baik di dalam maupun di luar negeri. Pada akhirnya, bentrokan dan perang dapat dihindarkan dari ketika orang menggunakan jiwa mereka, mereka dapat mencapai kolaborasi yang bermanfaat secara umum, di dalam negara dan juga melintasi batas-batas global. Semua kaum liberal setuju bahwa dalam jangka panjang kerjasama berdasarkan kepentingan bersama akan berlaku.

¹² Robert. Jackson and Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*.

Perkembangan oleh kaum liberal adalah suatu perkembangan atau kemajuan bagi individu. Pandangan dasar liberalisme adalah kebahagiaan dan kesenangan individu. Kaum liberal berpendapat bahwa negara ada untuk menjamin kebebasan warganya dan kemudian memungkinkan mereka untuk menjalani hidup mereka dan mencapai kebahagiaan mereka tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari orang lain¹³. Berbeda dengan kaum realis, yang melihat negara terutama sebagai sentralisasi dan instrument kekuasaan, *Machstaat*, yang membentuk dan menjalankan aturan hukum yang menghormati hak warga negara untuk hidup. Kaum liberal berpendapat bahwa modernisasi adalah proses yang mengarah pada kemajuan di banyak bidang kehidupan. Proses modernisasi memperluas cakupan kerjasama internasional lintas batas. Manusia memiliki pikiran, dan ketika mereka menerapkannya pada masalah-masalah internasional, hasil akhirnya adalah kerjasama yang lebih besar.

Liberalisasi perdagangan adalah kebalikan dari proteksionisme. Setelah pilihan proteksionis masa lalu, perkembangan pertukaran terjadi ketika otoritas publik memilih untuk kembali ke perdagangan yang disederhanakan. Liberalisasi perdagangan dapat terjadi secara sepihak. Namun, liberalisasi perdagangan ekstensif yang terjadi di antara negara-negara kaya pada paruh kedua abad ke-20 bersifat timbal balik dan multilateral. Pemerintah negara-negara saling membalas keputusan liberalisasi masing-masing, dan liberalisasi itu tidak diskriminatif dalam penerapannya kepada semua mitra dagang yang melakukan liberalisasi. Perjanjian dan konvensi internasional juga menyatukan aturan perilaku tentang perlindungan hal milik, termasuk hak kekayaan intelektual yang

¹³ Jackson and Sorensen. *Ibid*

terkait dengan pengetahuan kepemilikan. Hasil dari proses liberalisasi dan integrasi ini dikenal sebagai isasi global¹⁴.

Liberalisasi perdagangan telah menjadi cetak biru dunia di antara negara-negara untuk membangun keterbukaan pasar dengan sedikit hambatan perdagangan. Hal ini bertujuan untuk menghentikan atau mengurangi intervensi negara dalam bentuk hambatan masuk (tarif dan kuota) pada perdagangan dan ekonomi internasional. Saat ini, liberalisasi perdagangan telah menyebar ke seluruh dunia¹⁵.

Pemerintahan di berbagai negara di dunia sangat bergantung pada hubungan internasional yang baik dengan negara-negara lain secara korelasional di mana keduanya pihak dapat sangat diuntungkan. Selama hubungan internasional yang baik, negara-negara dapat mematuhi program yang berfungsi dalam pengembangan hubungan yang semakin berharga dengan manfaat prospek. Perdagangan bebas merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga hubungan internasional antar negara semakin kuat, sehingga sangat membutuhkan negara lainnya untuk saling bekerja sama dengan baik¹⁶.

Negara-negara yang saling ketergantungan ekonomi dapat mengurangi konflik dan perdagangan dapat menguntungkan negara, tetapi konflik hanya akan mengurangi atau sepenuhnya memutus perdagangan. Nilai perdagangan bisa menjadi sangat tinggi sehingga negara yang bersangkutan menjadi tergantung secara ekonomi pada negara lain. Jika dua negara telah mencapai titik ketergantungan timbal balik (saling

¹⁴ Charles K. Rowley and Friedrich G. Schneider, 'Trade Liberalization and Globalization', *Readings in Public Choice and Constitutional Political Economy*, 2015, pp. 1–625 <<https://doi.org/10.1007/978-0-387-75870-1>>.

¹⁵ Rossanto Dwi Handoyo and others, 'Trade Liberalization and Labor Demand in Indonesia', *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10.5 (2020), 758–60 <<https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i5/7246>>.

¹⁶ Samson Baraza, 'International Relations: What Causes States to Pursue Free Trade', *SSRN Electronic Journal*, April, 2020, 1–9 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.3517710>>.

ketergantungan) ini, negara-negara yang saling ketergantungan akan menilai kelanjutan hubungan perdagangan lebih tinggi daripada potensi keuntungan apa pun yang akan diperoleh melalui perang¹⁷.

Saling ketergantungan yang tinggi dapat mendorong perdamaian, seperti yang dipertahankan oleh kaum liberal, selama negara-negara mengharapkan tingkat perdagangan di masa depan semakin meningkat, harapan positif untuk perdagangan dimasa depan akan menyebabkan negara-negara yang bergantung untuk menetapkan nilai yang diharapkan tinggi untuk perdagangan damai yang konstan, dan menjadikan perang sebagai pilihan yang kurang menarik. Semakin tinggi ketergantungan suatu negara dan harapan untuk perdagangan masa depan, maka semakin tinggi juga nilai yang diharapkan untuk perdagangan damai, dan karena itu semakin besar kemungkinan suatu negara untuk menghindari perang¹⁸.

Pendapat inti para kaum liberal adalah perdagangan langsung memberikan manfaat yang berharga, atau keuntungan dari perdagangan, untuk negara tertentu. Oleh karena itu, negara yang bergantung harus berusaha menghindari perang, karena perdagangan yang damai memberikan semua manfaat hubungan dekat tanpa biaya dan risiko perang. Perdagangan membayar lebih dari perang, jadi negara-negara yang bergantung harus memilih untuk berdagang bukan menyerang¹⁹.

2.1. Teori Keunggulan Komparatif

Untuk menganalisis teori keunggulan komparatif Indonesia tentang ekspor karet ke negara China penulis mengambil teori keunggulan komparatif sebagai langkah awal mengukur sejauh mana teori ini terealisasi

¹⁷ Joel Einstein, 'Economic Interdependence and Conflict – The Case of the US and China', *E-International Relations Students*, 2017, pp. 1–9.

¹⁸ Mina E. Tanius, 'The Impact of Economic Interdependence on the Probability of Conflict between States', *Review of Economics and Political Science*, 4.1 (2019), 38–53 <<https://doi.org/10.1108/repss-10-2018-010>>.

¹⁹ Tanius. *Ibid*

dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dari teori tersebut. Teori ini sangat mendominasi ekonomi internasional atau perdagangan internasional. Dengan adanya teori ini juga sangat bermanfaat bagi negara-negara berkembang untuk bisa membuka pasar dan bergabung dengan rezim perdagangan bebas untuk meningkatkan kesejahteraan hidup negaranya. Seluruh proses liberalisasi perdagangan WTO yang menganggap bahwa kesejahteraan ekonomi global dapat dimaksimalkan melalui perdagangan bebas memiliki landasan teoritisnya dalam teori keunggulan komparatif²⁰.

Ketersediaan sumber daya di suatu negara memberikan sumber keunggulan komparatif lain bagi negara yang belum tentu memiliki teknologi yang unggul. Di bawah asumsi restriktif tertentu, keunggulan komparatif dapat diperoleh karena perbedaan dalam faktor anugerah relatif. Suatu negara memiliki keunggulan komparatif dalam produksi komoditas tersebut yang menggunakan sumber daya yang relatif melimpah di negara tersebut secara lebih intensif. Misalnya, kertas koran menggunakan sumber daya alam (hasil hutan) lebih intensif dibandingkan tekstil. Tekstil menggunakan tenaga kerja (L) lebih intensif dibandingkan kertas koran. Kanada relatif berlimpah sumber daya alam (R) dibandingkan dengan India. $(R/L) \text{ Kanada} > (R/L) \text{ India}$. Ini berarti R akan relatif lebih murah di Kanada dibandingkan dengan India. Dengan demikian, Kanada memiliki keunggulan komparatif dalam kertas koran dan karena itu akan mengkhususkan dan mengekspor kertas koran ke India. Demikian juga, India memiliki keunggulan komparatif

²⁰ Reinhard Schumacher, 'Deconstructing the Theory of Comparative Advantage', *World Economic Review*, 2 (2013), 83–105.

dalam tekstil dan karena itu akan mengkhususkan dan mengekspor tekstil ke Kanada²¹.

Skala ekonomi dapat memberikan manfaat relatif dengan menurunkan biaya penciptaan. Ekonomi luar yang bekerja dengan menurunkan biaya normal perusahaan mungkin benar-benar terjadi karena strategi modern atau pekerjaan proaktif otoritas publik dalam memberikan kerangka kerja yang lebih baik atau tenaga kerja yang lebih terlatih atau siap. Skala ekonomi (internal) yang dicapai melalui keberadaan pasar dalam negeri yang besar atau aksesibilitas yang didorong oleh kebijakan ke pasar yang lebih besar di luar negara (misalnya karena serikat pabean) juga menyiratkan biaya pembuatan yang lebih rendah. Hal ini dapat menambah atau menciptakan keunggulan komparatif bagi industri yang mengalami skala ekonomi seperti itu.

Teori keunggulan komparatif menurut Satya Dev Gupta model keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif saling melengkapi dalam menentukan dan mempertahankan keunggulan suatu negara dalam perdagangan dan bisnis internasional²².

Kemudian Salvatore, mengemukakan pendapatnya tentang keunggulan komparatif adalah meskipun sebuah negara kurang efisien dibanding negara lain dalam memproduksi kedua komoditi, namun masih tetap terdapat dasar untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak²³.

²¹ Satya Dev Gupta, 'Comparative Advantage and Competitive Advantage: An Economics Perspective and a Synthesis', *Athens Journal of Business & Economics*, 1.1 (2022), 9–22 <<https://doi.org/10.30958/ajbe.1-1-1>>

²² Satya Dev Gupta, 'Comparative Advantage and Competitive Advantage: An Economics Perspective and a Synthesis', *Athens Journal of Business & Economics*, 1.1 (2022), 9–22 <<https://doi.org/10.30958/ajbe.1-1-1>>

²³ Vega Falcon Dr. Vladimir, *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1.69 (2016), 5–24.

Dalam perdagangan internasional, keunggulan komparatif adalah negara yang tidak menikmati keuntungan langsung dalam pengembangan barang dagangan, namun negara tersebut dapat memimpin pertukaran global dengan memilih atau membeli produk yang menurut otoritas publik negara tersebut lebih efektif dan efisien bagi suatu proses produksi. Sehingga suatu barang atau jasa yang dibeli dari negara lain, maka negara tersebut bisa dapat membuat produksi barang menjadi efisien dan efektif. Sebagai contoh, sebuah negara A akan memproduksi kertas, akan tetapi bahan-bahan pokok dan alat-alat untuk memproduksi kertas tersebut sangat mahal di negara A, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi harga jual kertas di negara A. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, negara A melakukan perdagangan internasional dengan mengimpor bahan-bahan pokok atau alat-alat produksi kertas yang lebih murah dari negara B. Dengan mengimpor bahan-bahan atau alat-alat yang lebih murah dari negara B, Negara A dapat memproduksi kertas lebih efisien dan dapat dijual dengan harga terjangkau²⁴.

Dari beberapa pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan tentang keunggulan komparatif merupakan walaupun sebuah negara tidak memiliki keunggulan absolut atau barang dan jasa yang dibutuhkan memiliki kendala maupun hambatan, akan tetapi negara tersebut bisa mengimpor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan negaranya.

Terdapat beberapa karya ilmiah atau penelitian terlebih dahulu yang telah diteliti terkait dengan keunggulan komparatif. Dari penelitian-penelitian tersebut, penulis menjadikannya sebagai bahan acuan untuk menyelesaikan penelitian penulis.

²⁴ Farah Fadila, 'Pengertian Dan Teori Perdagangan Internasional Menurut Para Ahli - Gramedia Literasi', 2021 <<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-teori-perdagangan-internasional/amp/>>.

Penelitian yang berjudul "*The Evolution of Comparative Advantage: Measurement and Welfare Implications*" yang ditulis oleh Andrei A. Levchenko. Diketahui, bahwa ketika pertumbuhan produktivitas menjadi bias terhadap sektor-sektor di mana suatu negara memiliki kerugian komparatif, negara dan mitra dagangnya mungkin mengalami kerugian kesejahteraan, relatif terhadap alternatif di mana pertumbuhan seimbang di seluruh sektor. Perbedaan teknologi yang relatif lebih besar menyebabkan keuntungan yang lebih besar dari perdagangan, dan dengan demikian kesejahteraan dapat dikurangi ketika negara-negara menjadi lebih mirip satu sama lain.

Efek ini hadir di semua periode waktu dan kelompok negara utama, di dalam suatu negara, sektor dengan produktivitas relatif awal terendah mengalami pertumbuhan produktivitas yang lebih cepat secara sistematis daripada sektor dengan produktivitas awal tertinggi. Menggunakan eksperimen kontrafaktual, menunjukkan bahwa jika produktivitas sektoral relatif tidak berubah dengan cara ini, volume perdagangan global akan lebih tinggi, pangsa perdagangan lebih berbeda antar negara, dan perdagangan intra industri akan lebih rendah. Sementara peningkatan produktivitas secara keseluruhan sejak tahun 1960-an meningkatkan kesejahteraan, ternyata perubahan produktivitas relatif menahan pertumbuhan rata-rata tetap memiliki dampak kesejahteraan negatif yang sederhana²⁵.

Penelitian selanjutnya yang berjudul "*Trade Liberalization and Comparative Advantage: Evidence from Indonesia and Asian Trade*

²⁵ Andrei A. Levchenko and Jing Zhang, 'The Evolution of Comparative Advantage: Measurement and Welfare Implications', *Journal of Monetary Economics*, 78 (2016), 96–111 <<https://doi.org/10.1016/J.JMONECO.2016.01.005>>.

Partners” yang ditulis oleh Rudi Purwono, Lilik Sugiharti, Rossanto Dwi Handoyo dan Miguel Angel Esquivias. Penelitian ini menganalisis apakah liberalisasi melalui perjanjian yang ditandatangani oleh Indonesia dengan sembilan belas negara mendukung efek penciptaan perdagangan, memungkinkan negara untuk mendapatkan keuntungan dari skema perdagangan bebas dan apakah perjanjian perdagangan tambahan mungkin akan mengubah pola ekspor dan impor untuk negara dari waktu ke waktu. Studi ini pertama-tama menerapkan model gravitasi untuk memperkirakan pengaruh FTA dalam arus perdagangan antara 16 ekonomi di kawasan ASEAN *Plus Six*.

Beberapa kesimpulan dapat dikemukakan dalam penelitian ini. Pertama, banyaknya perjanjian perdagangan yang ditandatangani oleh Indonesia mungkin telah mendukung pesatnya ekspansi perdagangan yang dialami negara tersebut, karena sebagian besar keuntungan perdagangan terjadi dengan mitra regional. Kedua, mitra dagang juga mengalami ekspansi perdagangan ekonomi yang besar, menawarkan peluang kepada Indonesia untuk memperluas perdagangan dan mendapatkan keuntungan dari pasar yang besar dan berkembang di Indonesia. Ketiga, pertumbuhan Indonesia ditopang kuat oleh sektor sumber daya alam dan produk primer yang memperoleh keuntungan paling signifikan. Keempat, pembukaan pasar mungkin telah berkontribusi pada lingkungan persaingan yang lebih sehat bagi industri tradisional Indonesia (antara lain tekstil, alas kaki, dan kayu). Negara-negara dengan pola serupa Indonesia diuntungkan dengan pembukaan pasar (China, Vietnam, dan Thailand). Kelima, sektor tulang punggung Indonesia (kompetitif setidaknya sejak 2005) menyumbang hampir 65% dari total ekspor.

Beberapa komoditas kehilangan daya saing, sedangkan beberapa komoditas baru juga memperoleh daya saing. Keenam, Indonesia mengembangkan kemampuan dalam sektor baru (yaitu, transportasi) tetapi kalah di sektor yang berkembang pesat di Asia (mesin dan listrik), kehilangan satu dekade ekspansi besar dalam jaringan produksi di Asia. Ketujuh, meskipun lanskap persaingannya agresif, kemungkinan ekspansi perdagangannya besar, karena lebih dari 50% barang Indonesia menikmati keunggulan di bidang yang tidak dimiliki negara lain. Karena pola perdagangan yang ketat sehubungan dengan keunggulan komparatif dan spesialisasi ekspor untuk sebagian besar negara mitra dagang, perjanjian tersebut mungkin telah memberikan tekanan pada persaingan daripada mendorong perdagangan tambahan (penciptaan perdagangan) atau memungkinkan negara untuk memperluas perdagangan dengan barang baru²⁶.

Kemudian penelitian yang diteliti oleh Indah Kurniawati, yang berjudul *“Dampak ACFTA Terhadap Perdagangan Sektor Industri dan Pertanian Indonesia (Studi Komparatif Indonesia-China dan Indonesia-Vietnam)”*. Penelitian ini melihat untuk menganalisis daya saing kawasan industri Indonesia dikontraskan dengan China ketika pemahaman pengaturan ACFTA, membedah intensitas wilayah agraria Indonesia dikontraskan dengan China saat pemahaman pengaturan ACFTA, menyelidiki keseriusan kawasan modern Indonesia dikontraskan dengan Vietnam saat pengaturan ACFTA. Apalagi, melihat keseriusan kawasan hortikultura Indonesia dikontraskan dengan Vietnam saat pengaturan ACFTA.

²⁶ Rudi Purwono and others, 'Trade Liberalization and Comparative Advantage: Evidence from Indonesia and Asian Trade Partners', *Economies*, 10.4 (2022), 80 <<https://doi.org/10.3390/economies10040080>>.

Berdasarkan indeks RCA, dampak ACFTA terhadap daya saing industri menurun, walaupun sebelum ACFTA daya saing industri juga lebih lemah akan tetapi lebih menurun setelah ACFTA sehingga Indonesia justru lebih menjadi pengimpor industri dibandingkan pengekspor. Pada bidang pertanian, Indonesia dan China sama-sama lemah setelah ACFTA tapi jika dibandingkan Indonesia lebih pengekspor pertanian dibandingkan China, begitu pula Indonesia dan Vietnam, sama-sama juga lemah setelah setelah ACFTA, akan tetapi Indonesia lebih cenderung menjadi negara pengekspor pertanian dibandingkan Vietnam. Dari artikel penelitian ini mengatakan bahwa. Kajian dampak ACFTA terhadap keseriusan kawasan modern dan pedesaan masih terlalu luas, sehingga memahami penyebab atau penjelasan di balik lemahnya intensitas yang terjadi di kedua sektor tersebut berada di luar jangkauan kemungkinan. Dengan cara ini, pemeriksaan lebih lanjut diharapkan dapat memutuskan alasan lemahnya daya saing sektor industri dan pertanian Indonesia.²⁷.

2.1.1 Konsep Perdagangan Bebas

James Parlane mengatakan istilah perdagangan bebas secara umum mengacu pada pergerakan bebas barang, jasa, tenaga kerja, dan modal melintasi batas negara tanpa campur tangan dari hambatan ekonomi atau peraturan yang diberlakukan pemerintah. Terlepas dari kenyataan bahwa itu sering dianggap bertentangan dengan tujuan dukungan, banyak analis keuangan dan produsen strategi memandang perdagangan yang benar-benar efisien sebagai tujuan pasti dari hubungan moneter global. Perdagangan yang disederhanakan, secara lebih eksplisit, mengacu pada

²⁷ Indah Kurniawati, 'Dampak ACFTA Terhadap Perdagangan Sektor Industri Dan Pertanian Indonesia (Studi Komparatif Indonesia-China Dan Indonesia-Vietnam)', *Eko-Regional*, 9.2 (2014), 114–24.

upaya multilateral dalam asosiasi pertukaran dunia untuk mengubah pertukaran dengan mengurangi biaya impor (pajak) dan menghilangkan batas-batas non-pajak secara universal. Ini juga mengacu pada pengaturan masing-masing dan provinsi yang mengubah pertukaran antara mitra dagang²⁸. Sebagian besar negara melihat akses pasar yang diberikan oleh perdagangan bebas sebagai keuntungan bagi warganya.

Sebagian besar perdagangan antara anggota perjanjian perdagangan bebas adalah dengan barang-barang di mana tingkat tarif adalah nol atau lebih kecil. Sebagian besar negara juga memberikan akses bebas bea untuk *input* impor yang digunakan dalam produksi ekspor melalui skema zona perdagangan bebas dan skema pengurangan bea. Negara-negara menandatangani perjanjian perdagangan bebas karena baik untuk alasan kebijakan luar negeri dan keamanan maupun untuk alasan ekonomi negaranya. Atau seperti yang telah disebutkan, ada kecenderungan di pihak politisi dan teknokrat untuk memberi penekanan besar pada jalur perdagangan bebas menuju pembukaan perdagangan karena berbagai alasan non-ekonomi²⁹. Perdagangan bebas dapat dilakukan tidak hanya dalam hal prinsip-prinsip dasar ekonomi, tetapi juga dalam hal pengalaman negara-negara yang telah mengikuti kebijakan proteksionis

Perjanjian perdagangan bebas menurut Markenis, perdagangan bebas pada dasarnya merupakan kesepakatan perdagangan preferensial dan efek perdagangan yang sebenarnya dikondisikan oleh pilihan cakupan komoditas, yang pada dasarnya ditentukan oleh pertimbangan politik dan tekanan kelompok lobi. Suatu negara akan terus memperoleh keuntungan dari

²⁸ James Parlane, "Free Trade", *Berkshire Publishing*, s6-IV.105 (2011), 543 <<https://doi.org/10.1093/nq/s6-IV.105.543-l>>.

²⁹ Prema Chandra Athukorala, 'Free Trade Agreements in the World Trade System: Substance and Semantics', *Foreign Trade Review*, 55.1 (2020), 13–20 <<https://doi.org/10.1177/0015732519886771>>.

perdagangan bebas karena dapat memperoleh barang-barang tertentu yang tidak dapat diperoleh didalam negaranya sendiri³⁰. Perdagangan bebas juga dapat memaksimalkan pendapatan suatu negara dan memungkinkan warganya untuk mencapai kesejahteraan rata-rata yang lebih besar. Akses pasar perdagangan bebas mencakup akses ke barang, layanan lintas batas, modal, dan kekayaan intelektual.

Dengan adanya perdagangan bebas negara-negara dapat membuat suatu perjanjian perdagangan bebas yang tidak hanya mengurangi dan menghilangkan tarif, tetapi juga membantu mengatasi hambatan di belakang perbatasan yang akan menghambat arus barang dan jasa, mendorong investasi, dan memperbaiki aturan yang mempengaruhi masalah seperti kekayaan intelektual, e-commerce, dan pengadaan pemerintah. Perjanjian perdagangan bebas mempromosikan integrasi ekonomi regional dan membangun pendekatan bersama untuk perdagangan dan investasi antara negara dan mitra dagang negaranya. Perjanjian perdagangan bebas dapat memberikan pertukaran yang lebih luas dan membuka pintu usaha yang menambah perkembangan keuangan negara-negara yang kurang berkembang.

Perjanjian perdagangan bebas juga mendukung hubungan antar-warga dan bisnis kebisnis yang lebih kuat yang meningkatkan keseluruhan hubungan bilateral, regional maupun multilateral antar negara. Perjanjian perdagangan bebas dapat terus memberikan manfaat tambahan bagi suatu negara dan mitra dagangnya dari waktu ke waktu, termasuk melalui agenda

³⁰ B.S Markenis, 'The Theory and Practice Of', *Netherlands International Law Review*, 17.1 (2015), 1–4 <http://journals.cambridge.org/abstract_S0165070X00018921 How>.

bawaan yang mendorong reformasi domestik dan liberalisasi perdagangan yang sedang berlangsung³¹.

Pengertian perdagangan bebas menurut Samson Baraza adalah sebuah mesin pertumbuhan karena terus meningkat dalam skala global sehingga membuat kontributor yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara³². Negara-negara yang memberlakukan kebijakan perdagangan bebas dapat menciptakan dinamika ekonomi mereka sendiri yang memungkinkan mereka untuk mendorong peningkatan peluang dan kebebasan bagi setiap individu. Perdagangan memiliki beragam efek positif pada pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan karena akan ada peningkatan impor dan ekspor dalam skala yang lebih besar. Kemajuan ekonomi merupakan faktor penting menuju penciptaan dari bangsa yang stabil.

Melalui perdagangan bebas, negara dapat dengan leluasa meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya karena kemampuan untuk perdagangan secara bebas memberikan ruang untuk peningkatan standar hidup, pilihan, dan juga peluang. Negara-negara yang mengejar perdagangan bebas terbuka untuk perdagangan dan investasi internasional yang menstabilkan ekonomi umum negara-negara dari waktu ke waktu.

Herry Priyono sebagai pakar politik ekonom menyatakan, perdagangan bebas merupakan bentuk dari fundamentalisme pasar yang mungkin bisa menghancurkan pelaksanaan Hak Asasi Manusia. "Pasar bebas punya hubungan yang sangat kritis dengan HAM, tetapi antara pasar bebas dengan

³¹ John McEwen Crescent, 'The Benefits of Free Trade Agreements | Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade', *Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade*, p. 1 <<https://www.dfat.gov.au/trade/about-ftas/Pages/the-benefits-of-free-trade-agreements>>.

³² Samson Baraza, 'International Relations: What Causes States to Pursue Free Trade', *SSRN Electronic Journal*, April, 2020 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.3517710>>.

HAM tidak terlalu memiliki kontradiksi. Pasar bebas bisa menghancurkan dan membantu pelaksanaan HAM³³.

Menurut Friedrich A. Von Hayek, disebutkan bahwa hakikat pasar bebas atau perdagangan bebas itu membedakan antara sebuah ekonomi dalam pengertiannya yang ketat dan ekonomi pasar bebas. Ekonomi, mirip dengan keluarga atau organisasi yang disinggung sebagai ekonomi, hanya memenuhi satu kebutuhan. Ekonomi dalam pengertian ini umumnya berusaha untuk mencapai tujuan akhir yang ditandai dengan jelas. Kemudian lagi, ekonomi yang tidak diatur tidak melihat bahwa ada satu tujuan yang harus dicapai³⁴.

Aturan keseluruhan dari perdagangan yang disederhanakan adalah untuk menghilangkan hambatan khusus untuk perdagangan (*technical barriers to trade*) dengan mengurangi atau menghapus kegiatan yang menumbangkan pertukaran. Bagaimanapun, WTO mengingat kesepakatan damai masing-masing dan lokal untuk bidang pertukaran. Oleh karena itu, banyak negara-negara yang mencoba mencari cara lain yang bersifat liberalisasi dengan cara melalui Perdagangan Bebas Kawasan (*Regional Free Trade/RFT*), melalui mekanisme Kesepakatan Integritas Wilayah (*Regional Integration Agreement/RIA*), Kesepakatan perdagangan preferential atau kesepakatan perdagangan terbatas (*Preferential Trade Agreement/PTA*), kesepakatan Perdagangan Wilayah (*Regional Trade*

³³ Anis Siti Aisyah, 'MODALITAS INDONESIA DALAM KERJASAMA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN – CHINA (ACFTA)', 2012 <<https://eprints.umm.ac.id/31309/>>.

³⁴ Wiwik Saidatur Rolianah, 'PASAR BEBAS DI ERA GLOBALISASI DALAM Pendahuluan Pemasaran Global Bermula Di Inggris Dan Lebih Luas Lagi Di Besar Di Tingkat Global Hingga Tahun Ini . Jangkauan Pemasaran Yang Sekarang Diterapkan Di Seluruh Dunia Dan', *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8.2 (2018), 256–57.

Agreement/RTA), dan Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Area/FTA*)³⁵.

Terdapat beberapa karya ilmiah atau penelitian yang terkait dengan perdagangan bebas. Dari peneitian-penelitian tersebut, penulis menjadikannya sebagai bahan acuan untuk menyelesaikan penelitian penulis.

Penelitian yang berjudul tentang "*Pengaruh ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) Terhadap Ekspor Komoditi Kelapa Sawit dan Karet Alam Indonesia Ke China tahun 2006-2014*" yang ditulis oleh Yola Velinda Sari dan Suhandak³⁶. Penelitian tersebut mengatakan bahwa di era globaliasi sekarang negara-negara didunia semakin menyatu dalam bebrbagai bidang seperti dalam bidang budaya, ekonomi, sumber daya, dan teknologi informasi. Dengan adanya globalisasi ini juga meningkatkan kesepakatan kerjasama antar negara didunia melalui perdagangan internasional maupun antar regional. Semakin besar kerjasama ekonomi suatu negara atau semakin besar perdagangan yang dilakukan sebuah negara dengan negara lain maka semakin besar juga kesejahteraan yang akan dinikmati sebuah negara. Dalam penelitian ini meneliti tentang perbedaan eskpor karet alam dan Kelapa sawit Indonesia sebelum dan sesudah ACFTA pada tahun 2010. Dan kesimpulan dari penelitiannya yaitu, adanya pemberlakuan ACFTA di Indonesia pada tahun 2010 memberikan pengaruh signifikan terhadap ekspor karet alam dan kelapa Sawit Indonesia ke China. Hasil tersebut ditunjukkan dengan adanya perbedaan

³⁵ Tjarsonoldjang wita silvia, 'Dampak Kerjasama ACFTA Terhadap Ekspor Karet Indonesia-China (2010-2011)', 2011.

³⁶ Yola Velinda Sari and Suhadak, 'Pengaruh ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) Terhadap Ekspor Komoditi Kelapa Sawit Karet Alam Indonesia Ke China', *Jurnal Administrasi Bisnis*, 44.1 (2017), 54–61.

yang sangat jelas pada perkembangan nilai ekspor karet alam Indonesia ke China sebelum dan setelah diterapkannya ACFTA.

Penelitian selanjutnya berjudul "*Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA dan ACFTA Bagi Industri dalam Negeri*" yang ditulis oleh Agustina Balik³⁷. Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya AFTA dan ACFTA, Indonesia belum siap atau belum mampu untuk menjalaninya karena masih banyak perusahaan-perusahaan dalam negeri yang belum mampu menciptakan atau membuat barang-barang yang berkualitas tinggi yang dapat bersaing dengan produk-produk negara lain. Ketidaksiapan dunia usaha di Indonesia disebabkan karena lambannya pemerintah mengerjakan tugas-tugasnya, seperti misalnya tidak cepat menyelesaikan reformasi birokrasi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Sehingga hal ini harus ditanggung oleh pelaku usaha, misalnya banyaknya jalan tol yang melanggar hukum di lapangan dan menimbulkan tuntutan.

Kemudian penelitian berjudul "*The Effect of ASEAN-CHINA Free Trade Area (ACFTA) on Indonesia Export*", yang ditulis oleh Indriyani³⁸. Dari artikel ini dapat diketahui bahwa ACFTA berpengaruh positif signifikan terhadap ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN dan China. Hal ini sesuai dengan ACFTA sebagai salah satu bentuk liberalisasi perdagangan yang menurunkan atau menghapuskan tariff dalam meningkatkan ekspor. Akan tetapi harga komoditas ekspor Indonesia berpengaruh negatif signifikan terhadap ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN dan China. Naiknya harga komoditas menyebabkan penurunan ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN dan China. Sesuai dengan teori permintaan, bahwa

³⁷ Agustina Balik, 'Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri', *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Sasi*, 21.2 (2015), 41.

³⁸ Indriyani Indriyani, 'The Effect of ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) on Indonesia Export', *Etikonomi*, 15.2 (2016), 125–38 <<https://doi.org/10.15408/etk.v15i2.3331>>.

kenaikan harga akan menurunkan permintaan. Mitra dagang negara akan memilih harga terendah dari opsi alternatif untuk komoditas yang sama. Artinya, harga yang lebih rendah meningkatkan daya saing, jika negara pesaing menawarkan komoditas yang sama dengan harga yang lebih tinggi.

2.1.2 Konsep Rezim Internasional

Analisis tentang rezim internasional di seluruh dunia dalam penyelidikan hubungan internasional saat ini menonjol oleh para peneliti hubungan dunia, terutama sehubungan dengan bagaimana sistem dunia dapat mempengaruhi contoh kepentingan dan strategi negara sebagai *unitary and national actor* dan membuat contoh harmoni dalam hubungan internasional. Rezim internasional berkembang pesat setelah perang dunia kedua. Sampai sekarang ini rezim hampir melingkupi seluruh aspek hubungan internasional yang membutuhkan koordinasi antar negara-negara di dunia, mulai dari isu pertahanan, perdagangan, keuangan dan investasi, informasi dan komunikasi, hak asasi manusia, dan lingkungan³⁹.

Dalam studi hubungan internasional, rezim internasional merupakan sebuah istilah yang sangat erat dengan organisasi internasional. Rezim internasional dibentuk sebagai sebuah kebutuhan dalam mengkoordinasikan perilaku antar negara jika terjadi suatu masalah. Rezim internasional melayani kebutuhan utilitarian yang signifikan dalam hubungan di seluruh dunia. Rezim yang solid dipandang sebagai aktor otonom dalam masalah legislatif di seluruh dunia⁴⁰.

³⁹ Rendi Prayuda, Syafri Harto, and Desri Gunawan, 'Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep Dan Pendekatan Analisis)', *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2017, 97–111 <<https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index>>.

⁴⁰ Rivaldo Ganti Diolan Siahaan, 'Kedudukan Rezim Internasional Dalam Hukum Internasional Kontemporer (the Position of the International Regime in Contemporary International Law)', *Jurnal Hukum Lex Generalis*,

Menurut Siahaan rezim internasional merupakan dasar fondasi pembentukan dari organisasi internasional sehingga tampak luarnya adalah organisasi padahal sebenarnya jika menilik dari status pembuatan organisasi internasional tentulah berdasarkan kesepakatan seperti piagam (*Charter*) ataupun pakta (*Pact*). Pada tataran kelembagaan, rezim kemudian diimplementasikan dalam lingkup organisasi internasional yang meliputi isu, tujuan dan sasaran rezim tersebut. Penjelasan perbedaan konseptual antara organisasi internasional dan rezim internasional, yaitu:

- a. Rezim internasional berfokus pada perilaku *State Actors* dalam sebuah institusi internasional, sedangkan organisasi internasional berfokus pada peran atau tugas organisasi itu sendiri dalam hubungan internasional yang diakomodasi oleh hukum internasional.
- b. Rezim internasional membahas, melakukan atau menyelesaikan tugas, meluruskan dan memperbaiki segala sesuatu yang terjadi di dalam organisasi internasional (*intern*), sementara organisasi internasional menerapkan segala sesuatu yang telah dibahas dapat berupa kebijakan dan sumber hukum internasional (*ekstern*).
- c. Rezim internasional abstrak dalam perlakuan ruang lingkup hubungan internasional, sedangkan organisasi internasional merupakan suatu badan yang jelas sebagai subjek hukum internasional⁴¹.

Pengertian rezim internasional menurut Peterson, Rezim Internasional merupakan sebagai prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan implisit atau eksplisit, di mana harapan para aktor bertemu di bidang

2.1 (2021), 59–65 <<https://media.neliti.com/media/publications/334507-the-position-of-the-international-regime-633e723c.pdf>>.

⁴¹ Siahaan. *Ibid*

hubungan internasional⁴². Pengertian rezim internasional juga banyak dikemukakan oleh beberapa ahli lainnya.

Stephen Haggard dan Beth A. Simmons mengatakan bahwa rezim internasional muncul sebagai fokus penting dari riset empiris dan debat teoritis di dalam hubungan internasional. Kontras yang luar biasa antara model hubungan jalan raya yang serius dan kehilangan situasi dan "otoritas" masalah legislatif yang tumbuh di dalam negeri tampaknya mempertimbangkan banyak perilaku di antara negara-negara ciptaan. Padahal, isu strategi lahir dari rasa saling percaya yang berkembang sejak konflik universal yang memunculkan jenis koordinasi dan asosiasi lain yang sama sekali bertentangan dengan struktur nalar pragmatis yang berpikir tentang kerjasama antarnegara yang tidak dapat dipahami. Kehadiran sistem yang mendunia ini muncul karena kekecewaan terhadap ide-ide yang berlaku tentang aturan, otoritas, dan asosiasi global⁴³.

Definisi rezim dapat pula dikutip dari Donald Puchala dan Raymond Hopkins yang berargumen bahwa sebuah rezim ada di dalam setiap *issue area* hubungan internasional dimana terdapat keteraturan perilaku, seperti prinsip-prinsip, norma-norma atau aturan-aturan harus ada untuk dipertanggungjawabkan. Rezim merupakan cara paling murni yang sering digunakan untuk mendeskripsikan sebuah kelompok dari rangkaian perilaku-perilaku negara di dalam isu-isu tertentu⁴⁴.

Dalam sebuah artikel yang berjudul *International Regimes as Concept* yang ditulis oleh M.J.Peterson mengatakan bahwa definisi rezim terdiri atas tiga elemen utama yang ditulis oleh para penulis yaitu :

- 1) Serangkaian prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang saling terkait.

⁴² M. J. Peterson, 'International Regimes as Concept', *E-International Relations*, 2012, pp. 1–6 <<https://www.e-ir.info/2012/12/21/international-regimes-as-concept/>>.

⁴³ Prayuda, Harto, and Gunawan. *Ibid*

⁴⁴ Prayuda, Harto, and Gunawan. *Ibid*

- 2) Sekelompok aktor yang menggunakan susunan itu untuk memandu harapan mereka mengenai perilaku mereka sendiri dan orang lain.
- 3) Sebuah area masalah dimana susunan itu dan harapan-harapan itu akan dilibatkan⁴⁵.

Terdapat beberapa karya ilmiah atau penelitian yang terkait dengan rezim internasional. Dari peneitian-penelitian tersebut, penulis menjadikannya sebagai bahan acuan untuk menyelesaikan penelitian penulis.

Penelitian pertama yang berjudul “AFTA merupakan Rezim Perdagangan ASEAN”, yang ditulis oleh Abdul Gani dan Taufiq A. Ra. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan AFTA dalam melakukan perkembangan moneter dimulai dengan upaya untuk menjabarkan perluasan kerjasama provinsi di dalam asosiasi ASEAN, kemudian terjadi pemahaman dan kesepahaman antara kepala negara ASEAN yang menyatu dan terkoordinasi. Dalam komponen ekonomi yang berdaulat dan terkoordinasi, latihan kerjasama ASEAN terus berupaya untuk memperkuat AFTA sebagai kemajuan moneter dan pertukaran teritorial atau provinsi. Jadi prinsip dan pedoman yang memperkuat situasi AFTA sebagai sistem global untuk latihan keuangan ASEAN dan deregulasi dalam iklim dunia. AFTA sebagai suatu rezim berusaha memelihara kepentingan bersama, dengan tujuan akhir untuk membuat kemajuan bersama sebagai satu kesatuan dan selaras dengan prinsip, aturan, dan pemahaman bersama dengan asosiasi di kawasan ASEAN⁴⁶.

Penelitian selanjutnya yang berjudul “*Keberlangsungan Rezim Perdagangan Bebas World Trade Organizations (WTO) dengan adanya Kebijakan Proteksi Pertanian Amerika Serikat*” yang ditulis oleh Mohammad

⁴⁵ Peterson. *Ibid*

⁴⁶ Abdul Gani and Taufiq A. Ra, 'Afta Merupakan Rezim Perdagangan Asean', *Jurnal Assyifa' Ilmu Keperawatan Islami*, 6.2 (2021), 1–12 <<https://doi.org/10.54460/jifa.v6i2.8>>.

Ridwan⁴⁷. Hasil dari penelitian ini adalah keberlangsungan rezim perdagangan bebas WTO dengan adanya kebijakan proteksi pertanian Amerika Serikat adalah *Status Quo*. Dalam perundingan *Doha Development Agenda (DDA)* adapun prinsip yang disepakati yaitu Prinsip *Single Undertaking* yaitu prinsip bahwa semua masalah atau isu dalam perundingan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan oleh karena itu “tidak akan ada kesepakatan sampai semua masalah atau isu di sepakati” Hal ini dapat diketahui belum disepakatinya 2 pilar dalam isu pertanian yaitu subsidi domestik dan akses pasar. Pada perundingan terakhir di Nairobi Kenya, Amerika Serikat mendorong isu lain untuk dibahas yaitu seperti Investasi, e-commerce, kompetisi dan pengadaan pemerintah dan menolak untuk membahas masalah subsidi domestik.

Kemudian penelitian yang berjudul “*Banana Wars: Menginterpretasi Limit Rezim Perdagangan Bebas Multilateral dalam World Trade Organization (WTO)*”, yang ditulis oleh Maria Josephina Ruth Kezia Saudale⁴⁸. Hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui yaitu Perdebatan yang diajukan sehubungan dengan pertanyaan *Banana Wars* adalah bahwa aktivitas plot deregulasi di WTO masih menghadapi hambatan, terutama dari adanya variabel yang dapat diverifikasi yang membentuk kecenderungan pertukaran pisang antara Eropa dan Afrika, Karibia dan Pasifik (ACP). Dengan demikian, standar yang dibuat dalam sistem WTO tidak terpaku pada kenyataan bahwa negara-negara yang terkait dengan *Banana Wars*, terutama Eropa dan ACP, berfokus pada hubungan pertukaran yang membatasi antara provinsi dan kolonial dari tahun 1900 - 1992. Pembatasan perdagangan yang disederhanakan dibentuk oleh ikatan. yang

⁴⁷ Mohammad Ridwan, ‘Keberlangsungan Rezim Perdagangan Bebas World Trade Organizations (WTO) Dengan Adanya Kebijakan Proteksi Pertanian Amerika Serikat’, 2017, pp. 1–15.

⁴⁸ Maria Josephina Ruth Kezia Saudale, ‘Banana Wars: Menginterpretasi Limit Rezim Perdagangan Bebas Multilateral Dalam World Trade Organization (WTO)’, *Banana Wars*, 2021 <<https://doi.org/10.2307/j.ctv120qqss>>.

kemudian mencegah negara-negara bagian WTO dari melaksanakan kemajuan mutlak dalam pertukaran pisang di seluruh dunia.

Penelitian ini menjadikan ACFTA sebagai sebuah rezim internasional untuk kerjasama antara negara anggota ASEAN dengan China khususnya negara Indonesia dan China dalam perdagangan internasional. ACFTA sebagai suatu rezim perdagangan internasional diharapkan dapat mampu meningkatkan kerjasama yang lebih baik dalam bidang perdagangan internasional antara negara-negara anggota ASEAN dengan China.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Pada rancangan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang yang berarti pengumpulan datanya menggunakan literatur atau penelitian-penelitian terdahulu, berita, dan sumber tertulis lainnya. Pada dasarnya penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan membuat gambaran atau gambaran untuk memahami kekhasan apa yang mampu dilakukan oleh subjek penelitian, seperti cara berperilaku, kearifan, inspirasi, aktivitas, dan lain-lain. Metode ini digunakan sesuai dengan tujuan analisis, yaitu untuk menjelaskan perdagangan karet Indonesia-China dalam kerangka ACFTA.

Ada dua variabel yang saling berkaitan, sedangkan jenis hubungannya adalah bahwa penyesuaian satu variabel mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel lain. Variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel dependen merupakan variabel independen dan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi akibat dari adanya variabel independen. Dalam penelitian ini, ASEAN-China Free Trade (ACFTA) sebagai kebijakan pembebasan biaya tarif ekspor merupakan variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi terhadap perdagangan karet Indonesia ke China sebagai variabel dependen. Data yang digunakan dalam penelitian ini dalam menjawab rumusan masalah yaitu perkembangan ekspor karet Indonesia ke China tahun 2013-2017.

3.2 Kehadiran Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai *instrument* dan pengumpul data. Data yang digunakan merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, seperti penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti kerjakan, *literature*, buku dan artikel-artikel jurnal. Data-data yang dikumpulkan berkaitan dengan perdagangan karet atau ekspor karet Indonesia ke negara China. Kehadiran peneliti sangat dibutuhkan, mengingat peran peneliti sebagai *instrument* dan pengumpul data yang diperoleh dari berbagai literatur maupun data-data yang telah ada.

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data secara *online* dari berbagai sumber data yang ada. Adapun untuk memenuhi kebutuhan literatur serta informasi mengenai penelitian, peneliti memanfaatkan fasilitas kampus dan teknologi untuk pengumpulan data, sebagai berikut :

- a. Perpustakaan Universitas Fajar
- b. Perpustakaan *online* terkait *website* resmi yang berhubungan dengan topik

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder atau data yang telah ada sebelumnya. Dengan menggunakan data-data sekunder artinya peneliti tidak melakukan penelitian secara langsung atau sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Contoh sumber data sekunder yaitu seperti media perantara seperti buku, jurnal, koran, dan situs-situs pendukung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil data dari

berbagai sumber tersebut akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah di tentukan didalam penelitian ini.

Sedangkan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) merupakan kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan diselesaikan secara efisien untuk mengumpulkan, memproses, dan menutup informasi dengan menggunakan strategi/prosedur khusus untuk melacak jawaban atas masalah ⁴⁹. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah ada sebelumnya atau dari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, akan di gunakan untuk melakukan triangulasi data, mencocokkan atau menyesuaikan satu dokumen dengan dokumen yang lain untuk mendapatkan hasil analisis peran dan kontribusi ACFTA terhadap perdagangan karet Indonesia-China tahun 2013-2017.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis *Framing*. Analisis *framing* adalah pemeriksaan yang digunakan untuk memahami bagaimana media mengembangkan realitas. Penelitian ini juga digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa dipersepsikan dan digambarkan oleh media. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep *Framing* Robert N.Entman. Sebagai garis besar metode *framing* Robert N.Entman dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁴⁹ Milya Sari, 'Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA', *Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6.1 (2020), 41–53.

1. *Define problems* atau pendefinisian masalah, merupakan tahap pertama dalam analisis *framing* model Robert N. Entman. Mencirikan masalah adalah *frame* utama dari sebuah berita atau artikel. Dalam komponen ini dapat ditemukan dari titik mana seorang wartawan menyaksikan suatu peristiwa, sebagai apa, atau sebagai isu apa.
2. *Diagnose causes* atau memperkirakan masalah atau sumber masalah merupakan komponen kedua yang menggambarkan alasan peristiwa tersebut. Penyebabnya bisa berupa peristiwa atau penghibur atau penghibur yang menyebabkan peristiwa itu.
3. Elemen ketiga adalah *make moral judgment* yang digunakan untuk melihat kebajikan apa yang diperkenalkan untuk memahami masalah ini. Komponen ketiga adalah *frame* berita yang digunakan untuk melegitimasi atau memberikan tambahan pertentangan untuk membentengi komponen utama, yaitu pendefinisian masalah.
4. Terakhir atau keempat adalah *treatment recommendation*. Komponen ini digunakan untuk mengevaluasi cara apa yang diputuskan untuk menangani suatu masalah. Tujuan dari sebuah isu jelas didasarkan pada bagaimana sebuah peristiwa dilihat dan siapa yang dipandang sebagai alasan dari isu tersebut.⁵⁰

Teknik analisis *framing* yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan media *online* dalam meneliti ataupun menganalisis berbagai data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui media *online*. Dengan teknik ini peneliti akan menjelaskan lebih rinci mengenai topik yang akan diteliti.

3.6 Tahap-tahap Penelitian

⁵⁰ arikunto, 'Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Skripsi', *FIKOM UMN*, 2016 <http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/11/Daftar-isi-Metodologi-Penelitian_k1_restu.pdf>.

Kegiatan penelitian adalah proses dalam mendapatkan pengetahuan atau memecahkan permasalahan yang ingin dipecahkan, dilakukan secara ilmiah, sistematis dan logis. Berikut ini adalah tahapan penelitian yang dilakukan peneliti dan penjelasannya:

BAB 1 PENDAHULUAN, penulis menjelaskan mengenai latar belakang perdagangan karet Indonesia ke China yaitu adanya sebuah kerangka kesepakatan perjanjian antar anggota negara-negara ASEAN dengan China dalam mempermudah perdagangan antar negara ASEAN dan China. Selain itu, pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai fokus penelitian dan rumusan masalah yang dijadikan pedoman penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini peneliti menjelaskan konsep dan teori bertujuan untuk membantu peneliti untuk mendalami landasan teori dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Membantu peneliti untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsep perdagangan internasional dan teori keunggulan komparatif.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini peneliti menguraikan tentang uraian metode penelitian yang digunakan penulis, mulai dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, peneliti akan memaparkan mengenai rumusan masalah yang timbul dari penelitian ini, yaitu Bagaimana peran ACFTA dalam perdagangan karet Indonesia ke China dari tahun 2013 – 2017 dan Bagaimana kontribusi perdagangan karet terhadap pertumbuhan ekspor

Indonesia dari tahun 2013 – 2017 dalam kerangka ACFTA. Pada bab ini peneliti juga akan menganalisa pengaruh kerangka tersebut bagi kedua pihak yaitu bagi negara Indonesia dan bagi negara China itu sendiri.

BAB V KESIMPULAN, pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan mengenai data yang telah diteliti dalam penelitian serta saran terhadap kerangka kesepakatan perjanjian ACFTA khusus bagi Indonesia dan China.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Peran ACFTA terhadap Perdagangan Karet Indonesia ke China Tahun 2013-2017

Indonesia menjadi salah satu negara yang tumbuh berkembang dengan ikut bergabung melalui beberapa perjanjian perdagangan regional sebagai salah satu anggota ASEAN. Sebagai anggota negara ASEAN, Indonesia memiliki beberapa perjanjian perdagangan bebas dengan China, Korea, Jepang, India, Australia, Selandia Baru, dan 9 anggota ASEAN sendiri. Karena kecenderungan untuk ikut dalam beberapa perjanjian perdagangan semakin meningkat maka hal tersebut harus lebih diperhatikan terutama tentang hal yang menyangkut keuntungan dan kerugian. Oleh sebab itu, setiap perjanjian perdagangan bebas harus diperhatikan dengan seksama dan lebih mengutamakan kepentingan Indonesia.

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan suatu perjanjian kesepakatan bagi negara anggota ASEAN dan China dalam menciptakan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan tarif atau non-tarif perdagangan barang, peningkatan akses pasar terhadap jasa, reformasi aturan dan regulasi investasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN dan China. Dengan adanya ACFTA diharapkan dapat memberikan peluang untuk meningkatkan ekspor dari Indonesia⁵¹.

ACFTA memiliki beberapa aturan yaitu pengaturan asal usul produk atau barang, dan pendisiplinan tindakan anti-*dumping* (otorisasi pembalasan sebagai

⁵¹ 'ASEAN-CHINA', *Kementrian Perdagangan Republik Indonesia*, 2018
<<https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean-china>>

kewajiban impor tambahan yang dipaksakan atas suatu barang yang dijual di bawah harga biasa barang serupa di negara pengekspor maupun pengimpor), tindakan *countervailing* (ketika produsen asing melakukan kompetisi yang tidak adil), *safeguards* (perkiraan krisis mengenai ekspansi impor barang-barang tertentu, yang telah menyebabkan atau mengambil langkah-langkah yang benar-benar merugikan bisnis dalam negeri), dan mekanisme penyelesaian sengketa, sebagai tindakan atau cara untuk menjamin kelancaran perdagangan antara ASEAN dan China⁵².

ACFTA tidak hanya dibentuk dalam waktu singkat tetapi melalui beberapa tahap waktu untuk sampai pada tahap diimplementasikan. Pembentukan ACFTA dapat ditelusuri kembali ke kunjungan Perdana Menteri China Li Peng ke Bangkok pada tahun 1989 ketika ia menyatakan empat prinsip dalam membangun, memulihkan, dan mengembangkan hubungan dengan semua negara ASEAN. Diantaranya adalah : (1) hidup berdampingan secara damai meskipun terdapat perbedaan sistem sosial dan politik, (2) ideologi anti-hegemonik, yaitu China tidak akan berusaha menjadi kekuatan hegemoni dan juga tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara-negara ASEAN, (3) pengembangan lebih lanjut dari hubungan ekonomi dan (4) dukungan berkelanjutan atas kerjasama dan inisiatif regional dari ASEAN. Sejak itu, telah menjadi sebuah momen yang penting dalam kerjasama ekonomi China-ASEAN. Kerjasama ekonomi dibuka pada tahun 1991. Qian Qinchun, Menteri Luar Negeri China, menghadiri pembukaan Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN di Kuala Lumpur pada Juli 1991. Ia menunjukkan minat China untuk bekerja sama dengan ASEAN. Hal ini ditanggapi positif dengan kesepakatan untuk membentuk dua komite bersama, Komite Bersama untuk Kerjasama Ilmiah dan Teknologi dan

⁵² Asia-Pacific, Tilleke, and Gibbins, 'Antidumping, Countervailing Duties, and Safeguard Measures - Lexology', *LEXOLOGY*, 2014 <<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7837d574-033c-4974-a0e5-2774116f5ff6>>.

Komite Bersama untuk Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan atau *Join Committee on Economic and Trade Cooperation* (ACJETC). Komite-komite ini secara resmi dibentuk pada September 1993 ketika Dato' Ajit Singh, Sekretaris Jenderal ASEAN, mengunjungi Beijing. Pertemuan tersebut membahas tentang kerja sama ekonomi dan perdagangan⁵³.

Pada bulan Desember 1997, sebuah dokumen dari Tetangga yang Baik dan Saling Percaya yang Baik (*Good Neighborliness and Good Mutual Trust*) didirikan sebagai kerangka hubungan ASEAN-China. Mengutamakan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan prinsip keunggulan komparatif dan saling menguntungkan. Juga mendorong kerjasama di bidang sumber daya, teknologi, pasar, perbankan, informasi, sumber daya manusia, pengembangan dan investasi. Sebagai langkah nyata kerja sama ekonomi di ASEAN, China masing-masing menandatangani dokumen kerangka kerja sama perdagangan bilateral dengan Thailand dan Malaysia dan menandatangani pernyataan bersama tentang kerja sama masa depan dengan Vietnam dan Brunei pada tahun 1997. Selain itu, China telah menandatangani semua dokumen kerjasama perdagangan bilateral dengan masing-masing negara ASEAN pada akhir tahun 2000. Semua kerja sama perdagangan bilateral ini mendorong ASEAN dan China untuk memulai negosiasi untuk membentuk kawasan perdagangan bebas pada KTT ASEAN ke-7 di Brunei⁵⁴.

ASEAN yang merupakan sebagai organisasi regional internasional yang menaungi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang menyepakati sebuah rezim kerjasama dengan negara China yaitu ACFTA. Kaitan antara organisasi internasional dan rezim internasional sangat berkaitan erat karena rezim internasional merupakan upaya untuk memfasilitasi kerjasama.

⁵³ Tiarna P.Fitriani and others, *Indonesia-China Trade in ACFTA: Mapping of Competitiveness and Specialization*, APINDO-ACTIVE Working Papers, 2013.

⁵⁴ P.Fitriani and others. *Ibid*

Didalam rezim terdapat empat hal mutlak yaitu prinsip, norma, aturan dan prosedur pembuat keputusan. Dengan adanya ACFTA sebagai rezim perjanjian, akan memudahkan hubungan perdagangan ASEAN dengan negara China. Dengan adanya perjanjian ini juga produk-produk yang ada di negara-negara anggota ASEAN akan lebih mudah masuk ke China dan lebih murah begitupun sebaliknya karena adanya pengurangan tarif dan penghapusan tariff.

ASEAN mengimbau secara langsung kepada masing-masing anggotanya untuk melaksanakan kewajiban perjanjian mereka. Struktur bahasa, hak dan kewajiban dari Perjanjian kerangka kerja ACFTA menegaskan hal ini bahwa hak dan kewajiban perjanjian secara langsung ditanggung oleh masing-masing anggota dan bahwa hak dan kewajiban secara langsung berlaku antara masing-masing anggota ASEAN dan China. Negara-negara ASEAN bertanggung jawab langsung satu sama lain dalam hal melaksanakan kewajiban⁵⁵.

ASEAN bekerja sama dengan China dengan melihat potensi pengembangan pertukaran China. Karena China adalah salah satu kekuatan keuangan utama dunia yang telah menjadi kaki tangan perdagangan terbesar ASEAN hingga saat ini. Dengan kemajuan atau pertimbangan tersebut, semakin mendorong ASEAN untuk membantu China di bidang perdagangan dengan harapan bahwa kekuatan dan pertumbuhan ekonomi China bisa memberikan manfaat maupun keuntungan bagi negara-negara anggota ASEAN dan dengan harapan juga akan mendorong pertumbuhan perekonomian di negara-negara anggota ASEAN semakin berkembang. Ujung tombak yang dilakukan oleh kawasan lokal teritorial adalah dengan menata kawasan perdagangan lokal yang efisien, khususnya antara negara-negara yang merupakan individu dari ASEAN dan China melalui suatu kesepakatan.

⁵⁵ Wang Jianguo, *ASEAN-China Free Trade Agreement: Legal and Institutional Aspects, ASEAN-China Economic Relations*, 2019 <<https://doi.org/10.1355/9789812306562-009>>.

Saat ini dunia pasti merasakan kekuatan perkembangan perekonomian China. Negara dengan populasi terbesar di dunia ini telah berubah menjadi kekuatan moneter dunia. China sebagai negara dengan keberhasilannya menjadi pengekspor terbesar dan memiliki daya saing yang tinggi hal tersebut diperkuat untuk menjadikannya sebagai negara raksasa ekonomi dunia saat ini. Faktanya, AS yang selama ini dianggap sebagai pusat kekuatan ekonomi dunia, saat ini semakin khawatir terhadap perkembangan ekonomi China yang semakin pesat. Dengan perkembangan perekonomian China yang semakin pesat tersebut telah menjadikan negara ini sebagai *manufacturing industry center* di dunia, kekuatan militer yang semakin berkembang dan canggih, pengontrol perdagangan internasional, dan sekaligus penanam modal (investor) bagi sebagian besar negara-negara di dunia (terutama di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin). Integrasi China dalam ACFTA semakin memantapkan negeri ini sebagai penguasa ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Banyak pengamat atau tokoh-tokoh yang melihat ACFTA sebagai sebuah langkah strategis China untuk menghadapi tantangan atau hambatan-hambatan yang muncul dari kompetisi ekonomi regional khususnya untuk mengimbangi kekuatan blok ekonomi Amerika Serikat dan Jepang⁵⁶.

ACFTA terdiri dari 22 aturan dalam ekspor suatu barang atau produk ke negara pengimpor, aturan-aturan tersebut merupakan sebuah aturan ACFTA dalam pengeksporan yang harus dilaksanakan oleh seluruh anggota ACFTA. Setiap produk atau barang yang akan diekspor ke negara pengimpor harus memenuhi semua aturan tersebut, seperti misalnya pengeksporan karet Indonesia ke China, proses pengeksporan karet Indonesia harus memenuhi proses aturan-aturan yang telah disepakati untuk bisa di impor ke China. Sesuai

⁵⁶ Nawawi, 'Asean-China Free Trade Agreement (Acfta) Dan Realitas Kesiapan Sumber Daya Manusia Indonesia', *Masyarakat Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, XXXVI.2 (2010), 33 <ejournal.lipi.go.id/index.php/jmi/issue/download/75/73>.

dengan peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa ekspor karet Indonesia ke China selama rentang waktu dari tahun 2013-2017 yang telah dilampirkan di bagian-bagian tabel dalam pembahasan penelitian ini telah memenuhi syarat aturan-aturan ACFTA dan tanpa permasalahan apapun karena datanya telah di *upload* dan diambil dari buku elektronik badan statistik karet Indonesia. Adapun aturan-aturannya telah dilampirkan di bagian lampiran 1 (satu)⁵⁷.

Adapun kesepakatan ACFTA mempunyai tujuan yang diantaranya:

- 1) Memperkuat dan memperluas kerjasama ekonomi, perdagangan, dan penanaman modal antara ASEAN dan China,
- 2) Secara bertahap agar ASEAN dan China dapat secara maju meliberalisasi dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan sebuah rezim yang transparan, liberal dan fasilitatif terhadap penanaman modal asing,
- 3) Mengeksplorasi daerah baru dan mengembangkan langkah yang tepat bagi kerjasama ekonomi yang lebih erat antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan
- 4) Memfasilitasi penyatuan ekonomi yang lebih efektif dari negara-negara anggota baru ASEAN dan menjembatani perbedaan pembangunan diantara pihak yang bersangkutan⁵⁸.

Dari beberapa tujuan ACFTA diatas dapat di katakan secara perlahan telah tercapai khususnya dalam kerjasama perdagangan karet negara anggota ASEAN dengan China, sebagai bukti yaitu beberapa negara ASEAN menjadi

⁵⁷ Normal Track and Sensitive Track, 'Dokumen ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA)', 2016, p. 1.
⁵⁸ Azza Ayullah Kusuma, 'Dampak ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15.1 (2017), 1-14 <<https://doi.org/10.29259/jep.v15i1.8778>>.

pengekspor karet utama ke negara China dan Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara pengekspor karet utama ke negara China.

ACFTA juga dapat dipandang sebagai liberalisasi perdagangan, mengingat ACFTA perlu mengurangi impedansi dari otoritas publik dengan mengeluarkan pedoman yang dianggap sebagai batasan untuk perdagangan. Dengan adanya ACFTA negara-negara anggota ASEAN dan China dapat dengan mudah untuk beraktivitas melalui perdagangan, karena ACFTA menghapuskan pembatasan perdagangan, tetapi hal tersebut juga dapat memperumit kegiatan perdagangan karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan kapasitas antar negara. Namun, kegiatan perdagangan menjadi lebih baik karena biaya masuk dikurangi atau bahkan dihapuskan, sehingga tidak ada pembiayaan apapun.

Berhubungan dengan perdagangan bebas ACFTA, kesepakatan perjanjian ini bisa menimbulkan atau memberikan efek yang baik positif ataupun negatif. Dampak atau efek positif dari kesepakatan ACFTA tersebut akan dirasakan langsung ke daerah-daerah yang barangnya langsung dikirim ke China, sedangkan akibat buruknya dirasakan oleh pembuat dalam negeri yang barangnya seperti barang impor China, yang dipromosikan secara lokal dan memiliki tingkat intensitas yang relatif kurang kompetitif⁵⁹.

Meskipun perjanjian ini mendapatkan keuntungan dan kerugian di dalam negeri, pemerintah Indonesia menerima bahwa Indonesia sebenarnya ingin bersaing dan memperoleh keuntungan dalam plot partisipasi. Keyakinan ini didorong dengan fakta bahwa China merupakan sebagai salah satu pasar yang ekonominya terbesar di kawasan Asia dan ekspor Indonesia ke China setiap

⁵⁹ Ferry Prasetyia, 'Prospek Implementasi ACFTA Bagi Indonesia', 2010, pp. 1–2.

tahunnya lumayan mengalami peningkatan. Demikian juga, bagian dari ACFTA adalah wilayah perdagangan efisien yang sangat besar karena mencakup lebih dari 1,9 miliar individu dan memberikan tingkat pembayaran terbesar kedua setelah kolaborasi yang sebanding di Uni Eropa⁶⁰.

Kementerian Perdagangan terkait dengan informasi jumlah Impor Produk Indonesia (2003-2018) yang dipublikasikan oleh Kementerian Perdagangan yang disusun berdasarkan urutan tahun dengan negara mitranya dagangnya yaitu China. Nilai ekspor Indonesia ke China pada tahun 2003-2007 terus meningkat secara konsisten, dengan tujuan agar Indonesia memiliki kelebihan devisa. Namun demikian, dari tahun 2008 hingga 2018 Indonesia mengalami ketidakseimbangan impor/ekspor dimana secara konsisten jumlah impor lebih menonjol daripada jumlah ekspor⁶¹. Dari data tersebut menunjukkan atau bisa diketahui jika arus barang dan jasa dari China yang masuk ke Indonesia begitu deras.

Mulai sekitar tahun 2008 pasar dalam negeri Indonesia telah dipenuhi dengan barang-barang dari China dan negara-negara ASEAN. Dengan banyaknya barang-barang China yang memasuki pasar Indonesia, barang-barang Indonesia tidak dapat bersaing, terutama dengan barang-barang yang sebanding. Dimana barang-barang China yang masuk ke pasar Indonesia memiliki kualitas dan harga yang tidak jauh berbeda dengan barang-barang lokal. Seperti misalnya pada tahun 2016 berdasarkan Badan Pusat Statistik, impor dari China mencapai pangsa pasar sekitar 25,40%. Adapun barang impor dari China seperti mesin-mesin elektronik, mesin peralatan, bahan kimia, plastik dan barang dari plastik, filamen buatan, alat rumah tangga dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dengan diterapkannya ACFTA lebih banyak kerugian

⁶⁰ Nawawi. *Ibid*

⁶¹ Dokumen Skripsi 'Bab II Sejarah Dan Implementasi ACFTA', 2018. <https://eprints.umm.ac.id>.

daripada keuntungan bagi Indonesia. Namun, negara-negara ASEAN lainnya, terutama Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei, dapat memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan dari ACFTA ini karena mereka mengalami surplus perdagangan dengan China. Ini berarti bahwa dapat dikatakan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam lebih mendapatkan keuntungan dan manfaat dari perdagangan bebas tersebut⁶².

Indonesia sebagai negara bagian ASEAN dengan populasi dan pasar terbesar memiliki hubungan perdagangan yang erat dengan Cina, terutama setelah bagian dari kekuatan perjanjian ekonomi FTA ASEAN-China. Akan tetapi, setelah berlakunya kesepakatan perdagangan ini, Indonesia belum mengoptimalkan kesepakatan ini dengan baik sehingga total ekspor perdagangan Indonesia ke China belum seimbang bahkan masih tertinggal jauh dengan ekspor China ke Indonesia⁶³.

Salah satu solusi yang diterapkan pemerintah dalam mengatasi dampak perdagangan bebas dari membanjirnya produk impor terutama dari China. Indonesia memiliki standar nasional sendiri yang diterapkan pada tenaga kerja dan produk yang dipertukarkan di pasar Indonesia, khususnya SNI (Standar Nasional Indonesia). SNI sendiri adalah laporan yang memuat pengaturan khusus (aturan, aturan, atau kualitas) dari suatu gerakan yang hasilnya dibentuk oleh, tidak sepenuhnya ditetapkan oleh organisasi pemerintah yang disetujui (khususnya BSN/Organisasi Normalisasi Publik) untuk dimanfaatkan oleh mitra sepenuhnya dengan maksud mencapai konsistensi. Dengan adanya SNI yang berhasil, dapat meningkatkan daya saing nasional, meningkatkan transparansi

⁶² Dokumen Skripsi 'Bab II Sejarah Dan Implementasi ACFTA', 2018. <https://eprints.umm.ac.id>

⁶³ Sigit Setiawan, 'ASEAN-CHINA FTA: DAMPAKNYA TERHADAP EKSPOR INDONESIA DAN CINA ASEAN-China FTA: The Impacts on The Exports of Indonesia and China', *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 6.2 (2012), 1–27.

dan efisiensi pasar, sekaligus menjaga unsur-unsur kesejahteraan pembelanja, kesejahteraan umum, asuransi ekologi dan keamanan⁶⁴.

Kemajuan China dalam memperluas komoditasnya ke pasar Indonesia dengan cara yang penting terutama karena teknik biayanya yang rendah, meskipun banyak barang yang diperdagangkan memiliki pedoman kualitas yang kurang bagus. Untuk memperluas pintu masuknya ke pasar Indonesia dan mengharapkan konsistensi dengan SNI di kemudian hari, China telah bergerak cepat, efektif dan kuat untuk berkonsentrasi pada prinsip-prinsip barang Indonesia⁶⁵.

Telah menjadi suatu fakta bahwa Indonesia merupakan bagian dari ACFTA. Oleh karena itu, siap atau tidaknya Indonesia harus mematuhi dengan setiap kesepakatan keteraturan dalam perjanjian. Sikap Indonesia terhadap deregulasi, khususnya perdagangan yang disederhanakan dari ACFTA, dalam banyak kasus tidak jelas atau tidak tegas, benar-benar bermaksud bahwa dari satu sudut pandang Indonesia merasa pertanyaan bahwa akan ada kemungkinan pasar dalam negeri dipegang oleh negara-negara asing, namun sekali lagi di sisi lain. Jika Indonesia tidak mengejar gaya dan arah aliansi Internasional (FTA) maka Indonesia akan tertinggal jauh dari negara lain. Negara-negara ASEAN lainnya, khususnya Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei dapat memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari ACFTA ini dimana mereka mengalami kelebihan pertukaran. Dibidang lain diharapkan dapat lebih meningkat misalnya bidang investasi, di bidang inventasi, kerjasama ACFTA diharapkan dapat meningkatkan minat China di Indonesia, seperti yang telah diantisipasi oleh negara-negara ASEAN lainnya.

⁶⁴ Setiawan. *Ibid*

⁶⁵ Setiawan. *Ibid*

Dua negara yang menjadi obyek kajian yaitu Indonesia dan China yang sama-sama melihat manfaat dari pemberlakuan skema tarif ACFTA. Namun, dari sisi perdagangan kedua negara, China lebih mampu mengoptimalkannya sehingga menghasilkan manfaat atau keuntungan yang lebih besar daripada yang diperoleh Indonesia.

Pengaturan perjanjian perdagangan regional di beberapa negara di dunia memiliki tujuan yang sama mengenai liberalisasi perdagangan, meskipun dengan berbagai tingkat dan kedalaman. Beberapa kelompok regional memiliki persetujuan perdagangan barang, persetujuan perdagangan jasa, persetujuan investasi, dan kerjasama ekonomi, seperti perjanjian regional ASEAN dan China yaitu ACFTA. Dengan adanya perjanjian ACFTA diharapkan akan meningkatkan kinerja perdagangan antara negara anggota.

Sebelum ACFTA diterapkan, Indonesia telah melakukan berbagai perdagangan dan kerjasama dengan China dalam berbagai bidang. Untuk itu dengan diterapkannya ACFTA diharapkan memberikan peluang bagi Indonesia untuk dapat lebih meningkatkan daya saing ekspor ke China, khususnya dalam ekspor karet.

China menjadi salah satu negara dengan konsumen karet terbesar di dunia, karet yang paling banyak dikonsumsi atau paling tinggi tingkat permintaan impor ke negara China yaitu karet alam. Walaupun demikian, China juga menghasilkan karet alam dalam jumlah yang kecil. China hanya memproduksi sedikit karet alam karena iklim di wilayah China tidak memungkinkan untuk pertumbuhan karet. Pertumbuhan karet di China hanya tumbuh di beberapa wilayah, seperti di bagian wilayah Selatan yang memiliki iklim tropis (*evergreen*) dan subtropis dengan suhu udara benar-benar memperhitungkan perkembangan

karet. Tanaman karet di China dapat ditemui di wilayah Hainan, Guangdong, Guangxi, dan Fujian. Dengan keadaan iklim seperti itu, tidak semua klon yang dipelihara dapat berkembang biak di China. Klon yang dikembangkan secara luas sebagian besar yang dapat tahan terhadap angin, misalnya, beberapa klon lokal⁶⁶.

Produksi karet China dalam jumlah yang relatif kecil sehingga hal tersebut yang mendorong bagi China untuk mengimpor karet dari negara-negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya sebagai salah satu konsumen karet terbesar di dunia. Beberapa negara yang menjadi pengeksport karet terbesar ke China yaitu Thailand, Indonesia, Malaysia dan Vietnam. Tingginya penggunaan konsumsi karet di China dikarenakan pertumbuhan ekonomi China yang mendorong pembangunan infrastruktur dan industri otomatis di negara China. Berbagai kebutuhan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang berbahan dasar karet semakin meningkat, sebagai contoh ban merupakan hasil produksi dari karet serta berbagai macam alat kesehatan, mainan anak-anak, peralatan otomotif, sepatu, sandal dan lainnya, yang sebagian besar berbahan dasar karet. Seperti yang diketahui, China adalah negara dengan populasi terbesar di dunia ini, yang memiliki konsumsi karet yang tinggi dan sebagian besar produk karet yang diolah diperdagangkan di seluruh dunia, dengan cara ini China lebih memilih mengimpor karet alam dan kemudian memproduksinya, dan hasilnya di ekspor ke seluruh dunia.

⁶⁶ Atminingsih Atminingsih, 'Perbanyak Bahan Tanam Karet Juvenil Di China', *Warta Per karetan*, 32.1 (2013), 1–6 <<https://doi.org/10.22302/ppk.wp.v32i1.30>>.

Tabel 4.1 Perkembangan Ekspor Karet Alam dan Karet Sintetis Indonesia ke China Tahun 2006-2017 (ribu ton)

Tahun	Karet Alam	Karet Sintetis
2006	337.223	18.371
2007	341.821	21.684
2008	318.841	7.912
2009	457.118	4.991
2010	418.098	5.937
2011	409.377	14.576
2012	437.750	15.222
2013	511.700	16.849
2014	367.033	8.705
2015	289.490	26.824
2016	302.918	59.819
2017	445.540	254.110

Sumber : BPS, Statistik Karet Indonesia

Dari tabel diatas menunjukkan perbandingan sebelum dan sesudah penerapan ACFTA. Terlihat bahwa China lebih banyak mengimpor karet alam dari Indonesia dibandingkan karet sintetis. Dengan peran ACFTA yaitu kebijakan pembebasan tariff 0% tidak terlalu efektif terhadap ekspor karet alam maupun karet sintetis Indonesia ke China. Selama rentang waktu dari tahun 2013-2017, terlihat bahwa pada tahun 2013 merupakan tahun tertinggi volume ekspor karet alam ke China sekaligus menjadi jumlah ekspor tertinggi selama 12 tahun (2006-2017) dengan total ekspor sebanyak 511.700 ton, pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi total ekspor karet alam Indonesia ke China yaitu 367.033 ton

dan tahun 2015 menjadi tahun terendah dari rentang waktu 2006-2017 dengan jumlah ekspor karet alam ke China yang hanya mencapai 289.490 ton, meningkat kembali pada tahun 2016 yaitu 302.918 ton jumlah ekspor karet dan tahun 2017 tambah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan jumlah ekspor karet alam yaitu sebanyak 445.540 ton. Kemudian, untuk ekspor karet sintetis tertinggi pada tahun 2017 selama rentang waktu 2006-2017 dengan jumlah ekspor sebanyak 254.110 ton dan terendah pada tahun 2009 dengan total jumlah ekspor hanya 4.991 ton. Salah satu penyebab turunnya ekspor karet ke China, disebabkan karena turunnya permintaan impor karet dari industri ban di China, sebagai konsumen utama karet alam⁶⁷.

Kemudian pada tahun 2017 terlihat terjadi lonjakan ekspor karet sintetis ke China yang sangat tinggi dikarenakan beberapa hal, yaitu : Kurangnya stok karet di China disebabkan suplai ekspor karet dari Thailand sebagai negara pengekspor karet utama negara China berkurang karena terjadinya bencana banjir tahun 2017 di Thailand yang menghancurkan pabrik karet serta merusak tanaman karet sehingga berdampak pada produksi karet, dengan berkurangnya suplai permintaan impor karet dari Thailand hal tersebut juga berdampak pada harga karet internasional yang juga mengalami kenaikan⁶⁸, naiknya harga karet internasional Indonesia memanfaatkan kondisi tersebut dengan memproduksi karet dalam jumlah yang banyak untuk di ekspor ke negara lain khususnya ke negara China untuk mendapatkan keuntungan, penyebab lain tingginya ekspor karet sintetis ke China disebabkan karena terjadinya perang dagang antara AS dengan China yang berdampak kepada perdagangan kedua negara yang saling memberi biaya tarif ekspor impor kedua negara, salah satu produk AS yang

⁶⁷ Resty Puspa Perdana, 'Kinerja Ekonomi Karet Dan Strategi Pengembangan Hilirisasinya Di Indonesia', *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 37.1 (2020), 25 <<https://doi.org/10.21082/fae.v37n1.2019.25-39>>.

⁶⁸ Renat Sofie Andriani, 'HARGA KARET 23 JANUARI: Stok China Turun, Karet Menguat', *Bisnis.Com*, 2017 <<https://market.bisnis.com/read/20170123/94/621870/harga-karet-23-januari-stok-china-turun-karet-menguat>>.

terkena biaya tarif ke China yaitu karet sintetis⁶⁹, hal tersebut juga yang mendorong China untuk mengekspor karet sintetis dalam jumlah yang banyak dari Indonesia pada tahun 2017 karena dengan mengimpor karet sintetis dari Indonesia tidak ada pembiayaan tarif sebagai negara yang bergabung dalam kesepakatan ACFTA dibandingkan jika mengimpor dari AS yang dikenakan pembiayaan tarif.

4.1.1 Upaya Kerjasama Program *Early Harvest*

Pada perjanjian ACFTA dibahas sebuah program sekaligus menjadi peran ACFTA untuk membentuk meningkatkan kerjasama negara-negara anggota ASEAN dengan negara China dalam perdagangan karet yaitu program *Early Harvest* ini bertujuan untuk mempercepat penurunan dan penghapusan tarif produk pertanian sebagai langkah besar pertama dalam mewujudkan kawasan perdagangan bebas⁷⁰. Dengan adanya program ini dapat menghilangkan hambatan perdagangan antar negara-negara ASEAN dengan China khususnya dalam hambatan tariff. Tentang sektor pertanian yang tarifnya dijadikan 0%, karet yang merupakan produk unggulan sektor pertanian Indonesia berarti tarif ekspor karet Indonesia ke China juga 0 % yang dimulai pada 1 Januari 2010⁷¹. Pada tabel 1 terlihat jumlah volume ekspor karet Indonesia ke China sebelum dan sesudah ACFTA, setelah diterapkan dengan kebijakan bebas tarif dapat terlihat bahwa ACFTA cukup memberikan peran terhadap perdagangan ekspor karet Indonesia ke negara China. Walaupun belum terlalu memberikan dampak yang sangat signifikan, akan tetapi ekspor karet Indonesia ke negara China lumayan mengalami sedikit peningkatan dibandingkan sebelum penerapan

⁶⁹ Tane Hadiyantono, 'Perang Dagang AS-China Bisa Jadi Kesempatan Ekspor Karet', *Kontan.Co.Id* <<https://industri.kontan.co.id/news/perang-dagang-as-china-bisa-jadi-kesempatan-ekspor-karet>>.

⁷⁰ P.Fitriani and others. *Ibid*

⁷¹ I Dewa Gede Darma Putra and I Wayan Sudirman, 'PENGARUH PRODUKSI, HARGA, KURS DAN TARIF 0 % TERHADAP EKSPOR CPO INDONESIA DALAM SKEMA ACFTA', *E-Jurnal EP Unud*, 3.No. 9 (2014), 395–402.

ACFTA, seperti yang terlihat pada tabel diatas. Meskipun setelah penerapan ACFTA juga berfluktuatif karena disebabkan oleh beberapa hal seperti yang sudah dijelaskan sebagian diatas, beberapa faktor lain yang menjadi penyebabnya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal, seperti 1) Harga karet domestik, harga karet domestik berpengaruh terhadap jumlah ekspor karet, jika harga karet domestik naik atau meningkat maka jumlah ekspor karet akan menurun dan sebaliknya. Seperti pada tahun 2015 harga karet sebesar Rp. 10.852,/kg atau menurun sebesar 33,67% dibandingkan tahun 2014 yang harga karet sekitar Rp. 16.000,/kg. Kemudian pada tahun 2016 harga karet kembali naik meningkat menjadi Rp. 18.099,/kg. Pada tahun 2015 dengan menurunnya harga karet domestik, volume ekspor karet Indonesia menjadi positif, dengan total volume ekspor karet Indonesia menjadi 2,630,313, dan mengalami penurunan kembali menjadi 2,578,791 ton pada tahun 2016 karena harga karet domestik kembali meningkat.

2) Produksi karet domestik, jika produksi karet meningkat maka akan meningkatkan juga volume ekspor, begitu juga jika mengalami penurunan produksi maka volume ekspor juga akan menurun.

Faktor eksternal, yaitu 1) Harga karet internasional, Selain harga domestik yang berpengaruh terhadap ekspor karet alam Indonesia, harga karet internasional juga sangat berpengaruh karena banyak dari negara lain yang menjadi pemasok karet yang menjadi pesaing bagi Indonesia, dari tahun 2013-2017 harga karet dunia terus mengalami penurunan sampai mencapai titik terendah pada januari 2016 yaitu hanya mencapai 1,23 USD/kg dan tertinggi pada tahun 2017 hanya mencapai sekitar 2,71 USD/kg. 2) Nilai tukar rupiah Indonesia terhadap Yuan China, jika nilai tukar rupiah Indonesia terhadap Yuan China menurun maka volume ekspor karet Indonesia juga menurun, hal dapat

dilihat pada Grafik 5, 3) Adanya kebijakan *International Tripartite Rubber Council* (ITRC), Kebijakan ITRC cukup berpengaruh terhadap ekspor karet namun tidak terlalu berdampak terhadap harga karet dan nilai tukar petani. Karena dampaknya tidak dapat berjalan dengan lama, hanya bertahan pada tahun 2013 dan terus menurun hingga 2015, dan 4) Daya saing komoditas karet alam, negara yang mengekspor karet alam ke China bukan hanya Indonesia tetapi ada beberapa negara pesaing seperti Thailand dan Malaysia. Penjelasan yang lebih lanjut tentang faktor penyebab fluktuasi ekspor karet Indonesia ke negara China dapat dilihat di bagian pembahasan 4.2 poin c.

Rezim internasional merupakan sebagai prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan implisit atau eksplisit, di mana harapan para aktor bertemu di bidang hubungan internasional. Sehingga fungsi di bentuknya Rezim Internasional (ACFTA) bertujuan untuk memenuhi harapan negara-negara anggota ASEAN dengan negara China sebagai aktor utama ACFTA dalam partisipasi dunia untuk siklus kolaborasi. Sistem di seluruh dunia dengan cara seperti itu ditegaskan sebagai perantara atau instrumen bagi negara-negara yang berupa kesepakatan perjanjian dengan *ASEAN-China Free Trade Area* untuk memenuhi kepentingan setiap negara yang diperlukan melalui kolaborasi global. Sejalan dengan ini, nanti dapat mengatasi atau dapat mewakili dan terlebih lagi, mengartikulasikan kepentingan negara bagiannya. Khususnya bagi Indonesia dengan adanya perjanjian ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama Indonesia dengan China khususnya dalam bidang perdagangan⁷².

Pilihan untuk membentuk kawasan perdagangan ASEAN-China yang disederhanakan adalah tanda minat mendalam China di ASEAN, dengan alasan bahwa pada dasarnya melalui persetujuan pengaturan ACFTA, secara implisit

⁷² 'Dinamika Ekonomi Perdagangan Regional Asia Timur', 2010, pp. 1-21 <<http://eprints.umm.ac.id/31349/1/jiptumpp-gdl-s1-2011-hizbulwath-21976-BAB%2BI.pdf>>.

memberikan pintu terbuka bagi Cina untuk menyeimbangkan hubungan moneterinya. dengan ASEAN, yang merupakan mitra dagang terbesar kelima setelah Jepang, AS, Asosiasi Eropa (UE), dan Hong Kong. Semua anggota ASEAN termasuk Indonesia yang ikut terlibat dalam penandatanganan *Framework Agreement* hampir sependapat, ACFTA adalah merupakan sebuah rezim internasional yang lunak dengan perdagangan pasar yang lebih luas dan penuh perhatian dengan norma, aturan-aturan yang di implementasikan dengan perjanjian yang adil yang tidak merugikan satu sama lainnya, jika anggota ASEAN tidak berpartisipasi dalam penandatanganan ACFTA, kerugian perdagangan akan sangat signifikan, karena pertukaran barang dan jasa dengan tidak ikut berpartisipasi dalam perjanjian tersebut akan menghabiskan pengeluaran yang signifikan dan juga akan melemahkan ASEAN dalam pengaturan yang lebih penting, terutama dalam koordinasi pertukaran Asia Timur dan perdagangan Dunia ⁷³. Seperti pada tabel 1 salah satu bukti yang menunjukkan adanya dampak ACFTA terhadap ekspor karet Indonesia ke China yang cukup memberikan dampak walaupun belum terlalu memberikan dampak yang sangat signifikan, dibandingkan jika tidak adanya perjanjian tersebut.

ACFTA merupakan sebuah rezim internasional yang harus diperhatikan oleh ASEAN, khususnya bagi Indonesia. Pola rezim yang lunak dan tidak lagi kaku dan hegemonik merupakan nada positif bagi persatuan dan kesatuan antara setiap bangsa dan jelas para anggota ASEAN, khususnya bagi Indonesia sebagai negara yang hidup dalam tatanan global dengan segala informasi dan perkembangannya, dari rezim ACFTA, mereka yang tersedia dan diterima memiliki keinginan untuk mempertimbangkan penggunaan untuk berpartisipasi dalam realisasi kepentingan jangka panjang dan jangka pendek.

⁷³ 'Dinamika Ekonomi Perdagangan Regional Asia Timur'. *Ibid*

4.2 Kontribusi Perdagangan Karet Indonesia-China tahun 2013-2017 terhadap Pertumbuhan Ekspor Indonesia dalam Kerangka ACFTA

Perdagangan Internasional mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Dengan adanya perdagangan internasional juga mendapatkan keuntungan yang lainnya seperti misalnya, menghasilkan devisa untuk negara, memperoleh produk yang tidak dapat dikirim sendiri, memberdayakan perkembangan industrialisasi, kemajuan transportasi, kehadiran perusahaan transnasional dan lain-lain. Setiap negara di dunia memiliki sumber daya alam, karakteristik, ekonomi, sosial yang berbeda-beda dan segala sesuatu yang dihasilkan juga berbeda, untuk itulah perdagangan internasional sangat dibutuhkan. Kegiatan perdagangan internasional tidak dapat dibedakan dari latihan komoditas dan impor. Semakin terbuka suatu negara dalam memimpin bursa global, semakin tinggi peluang produk negara tersebut masuk ke negara tersebut. Perdagangan menyerupai inovasi pendorong untuk perkembangan moneter suatu negara dan menjadi bagian penting dari upaya peningkatan keuangan yang didukung suatu negara⁷⁴.

Karet sebagai salah satu keunggulan komparatif Indonesia memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karet merupakan komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran penting dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karet juga salah satu komoditi ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai penghasil devisa negara dan berkontribusi terhadap pendapatan ekonomi di luar minyak bumi dan gas.

⁷⁴ Muslika and Tamami. *Ibid*

Tabel 4.2 Perbandingan Nilai Ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Karet tahun 2013-2017 (000 000 US\$)

Tahun	Minyak Bumi	Gas	Karet
2013	10.204,7	18.129,2	6.706,9
2014	9.215,0	17.180,2	4.595,1
2015	6.479,4	10.340,8	3.564,1
2016	5.196,7	7.036,8	3.243,0
2017	5.354,9	8.746,5	4.958,3

Sumber: BPS, Badan Pusat Statistik

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ekspor gas menempati urutan pertama dengan jumlah nilai hasil yang tinggi, ekspor minyak bumi diposisi kedua kemudian ekspor karet berada di posisi ketiga. Dapat dilihat juga bahwa ekspor karet cukup berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia, Walaupun nilainya belum sebesar hasil ekspor minyak bumi dan gas. Nilai ekspor dari ketiga sumber penghasilan diatas menunjukkan hasil yang fluktuatif karena berbagai macam faktor, khususnya nilai ekspor karet disebabkan oleh jumlah volume ekspor karet yang di ekspor ke masing-masing negara tujuan utama.

Sebagian besar karet Indonesia di ekspor ke luar negara dan hanya sebagian kecil yang dikonsumsi dalam negeri. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki peran yang cukup penting dalam penghasilan terhadap perekonomian di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada bagian sektor pertanian kontribusinya

terhadap PDB yang cukup besar yaitu sekitar 14,43 persen pada tahun 2013 atau merupakan urutan kedua setelah sektor industri pengolahan⁷⁵.

Salah satu sub sektor yang cukup besar potensinya adalah sub sektor perkebunan. Walaupun kontribusi sub sektor perkebunan dalam PDB belum terlalu besar yaitu sekitar 1,93 persen pada tahun 2013 atau merupakan urutan ketiga di sektor pertanian setelah sub sektor tanaman bahan makanan dan perikanan, akan tetapi sub sektor ini merupakan penyedia bahan baku untuk sektor industri, penyerap tenaga kerja, dan penghasil devisa. Pada tahun 2013 nilai ekspor karet alam Indonesia ke China sebesar US\$ 1.307,40 juta dan nilai ekspor karet sintetis sebesar US\$ 23,99 juta⁷⁶.

Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2014 terhadap perekonomian Indonesia yaitu sebesar 13,38 persen kontribusinya terhadap PDB, kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDB sebesar 3,77 persen pada tahun 2014 dan merupakan urutan ketiga di sektor pertanian. Nilai ekspor karet alam Indonesia ke China sebesar US\$ 681.497 juta dan nilai ekspor karet sintetis sebesar US\$ 11.025 juta⁷⁷.

Kemudian pada tahun 2015 sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 13,52 persen, pada bagian sub sektor perkebunan menempati posisi pertama di sektor pertanian dalam memberikan kontribusi terhadap PDB yaitu sekitar 3,57 persen yang menjadi urutan pertama di sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian. Tahun 2015 nilai

⁷⁵ Andy Yusuf Kurniawan and Ucik Mawarsari, *Statistik Karet Indonesia 2013*, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2014, LIX.

⁷⁶ Yusuf Kurniawan and Mawarsari, LIX. *Ibid*

⁷⁷ Andy Yusuf Kurniawan, Ucik Mawarsari, and Lamiyanti, *Statistik Karet Indonesia 2014*, 2015.

ekspor karet alam Indonesia ke China sebesar US\$ 404.33 juta dan nilai ekspor karet sintetis sebesar US\$ 32.44 juta⁷⁸.

Pada tahun 2016 kontribusi sektor pertanian terhadap PDB yaitu sebesar 13,45 persen. Kemudian pada bagian sub sektor perkebunan kontribusinya terhadap PDB yaitu sebesar 3,46 persen, walaupun menurun dari tahun sebelumnya akan tetapi sub sektor perkebunan tetap bertahan pada posisi pertama dalam kontribusinya terhadap PDB pada sektor pertanian. Hasil nilai kontribusi ekspor karet alam terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia yaitu menghasilkan nilai sebesar US\$ 401.03 juta dan karet sintetis menghasilkan nilai sebesar US\$ 75.36 juta⁷⁹.

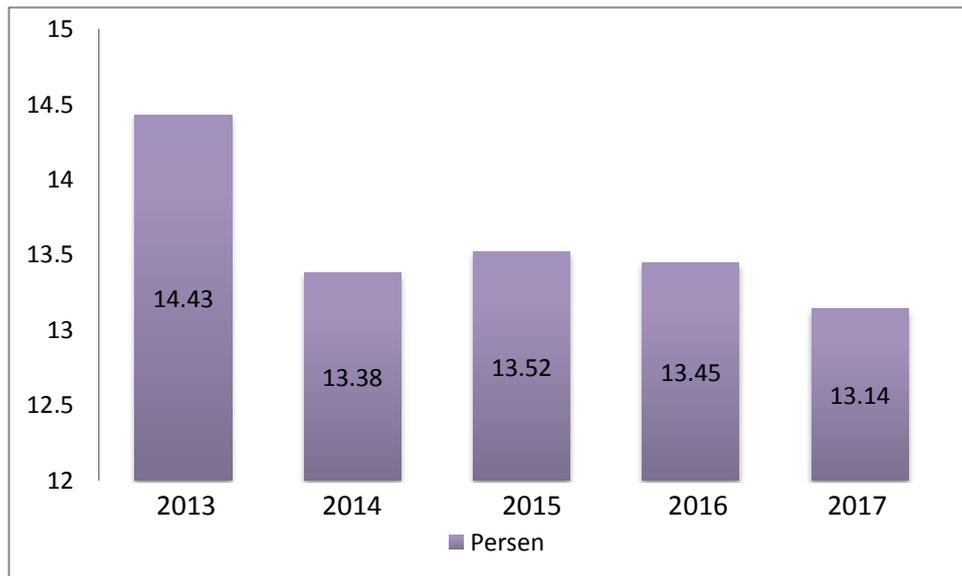
Dan pada tahun 2017 kontribusinya terhadap PDB sebesar 13,14 persen ini merupakan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia. Kontribusi sub sektor perkebunan dalam PDB yaitu sekitar 3,47 persen pada tahun 2017 dan tetap bertahan pada posisi pertama di sektor pertanian. Selama lima tahun terakhir, pada tahun 2017 menjadi tahun hasil nilai tertinggi ekspor karet Indonesia ke China. Hasil nilai ekspor karet alam Indonesia ke China pada tahun tersebut yaitu sebesar US\$ 764.11 juta dan hasil nilai ekspor karet sintetis yaitu sebesar US\$ 421.36 juta⁸⁰.

⁷⁸ *Statistik Karet Indonesia 2015, 2016.*

⁷⁹ *Statistik Karet Indonesia 2016, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2017, LIX.*

⁸⁰ *Statistik Karet Indonesia 2017, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2018, LIX.*

Grafik 4.1 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDB Indonesia tahun 2013-2017 (Persen)



Sumber: BPS, Statistik Karet Indonesia

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa persentasi kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2013-2017 mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2013 menunjukkan jumlah kontribusi sektor pertanian sebesar 14.43%, jumlah ini menjadi jumlah tertinggi selama lima tahun dari tahun 2013-2017. Diantara tahun setelahnya pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 13.38% dan meningkat lagi pada tahun 2015 yaitu sebesar 13.52%, kemudian pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing mengalami penurunan dan pada tahun 2017 menjadi jumlah kontribusi terendah dari tahun 2013-2017. Penyebab terjadinya fluktuatif kontribusi pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDB Indonesia yaitu disebabkan karena luas lahan untuk pertanian semakin sempit yang dialihkan menjadi lahan pembangunan industri, hotel, perumahan, apartemen, adanya pengahlian fungsi tersebut menyebabkan lahan pertanian semakin menyusut. Penyebab lainnya yaitu jumlah tenaga kerja pertanian yang juga semakin berkurang disebabkan

banyak tenaga kerja yang pindah dari desa ke kota. Kemudian minimnya inovasi baru dan keterampilan petani serta teknologi pertanian belum berkembang dengan baik⁸¹.

Grafik 4.2 Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDB Indonesia tahun 2013-2017 (Persen)



Pada grafik diatas menunjukkan bahwa persentasi kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2013-2017 mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2013 menunjukkan jumlah kontribusi subsektor perkebunan sebesar 1.93%, jumlah ini menjadi jumlah terendah selama lima tahun dari tahun 2013-2017. Diantara tahun setelahnya pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 3,77% dan menjadi kontribusi tertinggi selama tahun 2013-2017 mengalami penurunan lagi pada tahun 2015 yaitu sebesar 3,57%, kemudian pada tahun 2016 semakin mengalami penurunan yaitu sebesar 3,46% dan pada tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan yaitu

⁸¹ Finisuda Anding Istiana, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Di Indonesia Tahun 2013-2017', *Penelitian*, 1.1 (2018), 1-15
<http://www.fao.org/3/I8739EN/i8739en.pdf>
<https://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.01.003>
<https://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.007>
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.1224023>
<http://pdx.sagepub.com/lookup/doi/10>

sebesar 3.47%. Subsektor perkebunan menjadi subsektor pertanian yang mengalami perkembangan dengan baik, selama tahun 2013-2017, tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2015-2017 selalu menempati posisi pertama di sektor pertanian dalam memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia.

Penyebab terjadinya fluktuatif kontribusi subsektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDB Indonesia yaitu penyebabnya sama seperti penyebab terjadinya fluktuatif sektor pertanian yang disebabkan karena luas lahan untuk pertanian semakin sempit yang dialihkan menjadi lahan pembangunan industri, hotel, perumahan, apartemen, adanya pengalihan fungsi tersebut menyebabkan lahan pertanian semakin menyusut. Penyebab lainnya yaitu jumlah tenaga kerja pertanian yang juga semakin berkurang disebabkan banyak tenaga kerja yang pindah dari desa ke kota. Kemudian minimnya inovasi baru dan keterampilan petani serta teknologi pertanian belum berkembang dengan baik⁸². Faktor-faktor penyebab inilah yang menyebabkan hasil produksi sektor pertanian dan subsektor perkebunan naik turun yang berdampak pada kontribusi pertumbuhan ekonomi atau PDB Indonesia.

4.2.1 Perkembangan Ekspor Karet Indonesia ke China Tahun 2013-2017

Ekspor karet Indonesia secara umum dibagi dalam dua jenis yaitu karet alam dan karet sintetis. Karet alam terbuat dari lateks, yang sebagian besar diambil dari getah tanaman atau pohon karet, pada pohon karet dibuat sayatan, kemudian getahnya dikumpulkan atau ditampung dalam cangkir atau pot, kemudian disaring, dicuci dan direaksikan dengan asam untuk membuat partikel karet mengeras, membentuk massa, dikeringkan dan selanjutnya diproduksi diindustri untuk disempurnakan. Untuk karet

⁸² Istiana. *Ibid*

sintetis dibuat dengan polimerisasi berbagai zat berbasis minyak bumi yang dikenal sebagai monomer, atau dapat dikatakan karet sintetis adalah karet buatan.

Perkebunan karet Indonesia tersebar di beberapa provinsi di Indonesia yaitu Provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bali dan Maluku. Produksi karet Indonesia sebagian besar diekspor ke berbagai negara di dunia dan sisanya dipasarkan di dalam negeri.

Tabel 4.3 Jumlah Produksi Karet Alam Indonesia Menurut Provinsi tahun 2013-2017 (ton)

Provinsi	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sumatera Selatan	572.982	900.769	928.596	962.365	998.066
Sumatera Utara	498.582	444.535	410.606	432.769	464.155
Riau	419.030	315.789	318.681	338.546	362.823
Jambi	335.856	260.296	256.061	287.637	320.600
Kalimantan Barat	299.331	232.272	230.666	252.767	268.210

Sumber: BPS, Statistik Karet Indonesia

Dari tabel diatas menunjukkan lima provinsi dengan hasil produksi karet terbanyak di Indonesia. Posisi pertama ditempati oleh Sumatera Selatan dan posisi kelima oleh Kalimantan Barat. Banyaknya hasil produksi karet tersebut ditentukan oleh seberapa luasnya kebun tanaman karet tersebut.

Ekspor karet Indonesia menjangkau lima benua di dunia yaitu Asia, Afrika, Australia, Amerika dan Eropa. Dan terdapat beberapa negara besar yang menjadi tujuan utama ekspor karet Indonesia yaitu Amerika Serikat, Jepang, China dan beberapa negara lainnya.

Tabel 4.4 Volume Ekspor Karet Alam Indonesia menurut Negara Tujuan tahun 2013-2017

Negara	2013		2014		2015		2016		2017	
	Ton	%	Ton	%	Ton	%	Ton	%	Ton	%
Amerika Serikat	609,77	22,57	597,848	22,79	624,73	23,75	577,67	22,40	589,375	19,69
China	511,70	18,94	367,033	13,99	289,49	11,01	302,92	11,75	445,54	14,89
Jepang	425,87	15,76	409,024	15,59	425,07	16,16	421,7	16,35	463,69	15,49
Korea Selatan	147,31	5,45	158,739	6,05	182,87	6,95	179,56	6,96	192,83	6,44
India	144,49	5,35	195,811	7,46	204,60	7,78	230,95	8,96	258,98	8,65

Sumber: BPS, Statistik Karet Indonesia

Tabel diatas menunjukkan kelima negara tujuan utama dengan pengimpor terbesar karet alam dari Indonesia, menunjukkan bahwa Amerika Serikat selalu berada diposisi pertama dengan pengimpor terbesar karet alam Indonesia. Dari tahun 2013-2017, China hanya sekali berada di posisi kedua yaitu pada tahun 2013, tahun setelahnya selalu berada diposisi ketiga, Kemudian Jepang selalu berada di posisi kedua kecuali pada tahun 2013. Untuk negara India dari tahun 2014-2017 berada diposisi keempat dan pada tahun 2013 berada diposisi kelima. Korea Selatan berada diposisi keempat pada tahun 2013 dan tahun setelahnya selalu berada diposisi kelima.

Tabel 4.5 Volume Ekspor Karet Sintetis Indonesia menurut Negara Tujuan tahun 2013-2014

Negara	2013		2014		2015		2016		2017	
	Ton	%	Ton	%	Ton	%	Ton	%	Ton	%
China	16,849	42,96	8,705	19,09	26,82	52,24	59,82	65,87	254,11	84,38
India	9,279	23,66	12,847	28,16	5,21	10,15	4,36	4,8	2,14	0,71
<i>New Zealand</i>	2,349	5,99	6,401	14,04	4,78	9,31	6,59	7,26	6,33	2,1
Australia	2,280	5,81	8,845	19,40	6,90	13,43	8,26	9,09	12,13	4,03
Malaysia	1,727	4,40	-	-	1,65	3,21	-	-	-	-
Singapura	-	-	1,713	3,76	-	-	4,23	4,66	19,28	6,4

Sumber: BPS, Statistik Karet Indonesia

Tabel diatas menunjukkan negara-negara dengan pengimpor terbesar atau terbanyak karet sintetis Indonesia. Menunjukkan bahwa negara China sering menempati posisi pertama sebagai pengimpor karet sintetis Indonesia kecuali pada tahun 2014, China berada diposisi ketiga sebagai negara pengimpor karet sintetis dari Indonesia setelah India diposisi pertama dan Australia diposisi kedua. Negara yang lain seperti *New Zealand*, India, Australia, Malaysia dan Singapura, posisi mereka sebagai negara pengimpor karet sintetis dari Indonesia selalu berubah-ubah atau berganti-gantian, seperti misalnya negara Malaysia dan Singapura yang sering bertukar posisi berada diperingkat kelima sebagai negara pengimpor karet sintetis Indonesia.

a) Perkembangan Ekspor Karet Alam ke China

Total ekspor karet alam Indonesia ke China selama lima tahun terakhir dari tahun 2013-2017 cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2013

berat ekspor karet alam Indonesia ke China mencapai 511,70 ribu ton atau sekitar 18,94 % dari total volume ekspor karet alam Indonesia ke berbagai negara di dunia. Pada tahun 2014 mengalami penurunan dengan volume eskpor yaitu hanya sekitar 364,033 ribu ton atau jika dipersentasikan sekitar 13,99 % dari total volume ekspor karet alam Indonesia ke berbagai dunia. Pada tahun 2015 volume ekspor karet alam Indonesia ke China bukannya tambah naik justru tambah mengalami penurunan sekitar 2,98 % dari tahun sebelumnya, total volume ekspor karet alam Indonesia ke China pada tahun 2015 hanya mencapai 289,49 ribu ton atau 11.01 %. Pada tahun 2016 total volume ekspor karet alam Indonesia ke China mengalami sedikit kenaikan sekitar 0,74 %, dengan volume eskpor sekitar 302,92 ribu ton atau 11, 75 % dari total volume ekspor karet alam Indonesia tahun 2016 ke berbagai negara di dunia. Dan pada tahun 2017 volume ekspor karet alam Indonesia ke China mengalami peningkatan dengan total volume ekspor karet alam yaitu mencapai 445,54 ribu ton atau 14,89%.

Grafik 4.3 Perkembangan Ekspor Karet Alam Indonesia Ke China Tahun 2013-2017 (ribu ton)



Sumber :BPS, Statistik Karet Indonesia

b) Perkembangan Ekspor Karet Sintetis ke China

Total ekspor karet sintetis Indonesia ke China selama lima tahun terakhir tahun 2013-2017 sama seperti karet alam yang juga cenderung berfluktuatif. Akan tetapi, selama lima tahun terakhir China sering menempati peringkat pertama sebagai negara pengimpor karet sintetis Indonesia kecuali pada tahun 2014 China berada di peringkat ketiga. Pada tahun 2013, total volume ekspor karet sintetis ke China yaitu sebesar 16,85 ribu ton atau jika di persentasikan sekitar 42,96% dari total volume ekspor karet sintetis Indonesia. Pada tahun 2014, volume karet sintetis ke China mengalami penurunan yang sangat drastis, volume penurunannya mencapai sekitar 23,87%, total volume ekspor karet sintetis ke China hanya mencapai 8.705 ribu ton atau 19,09% dari total volume ekspor karet sintetis Indonesia ke berbagai dunia pada tahun 2014.

Kemudian pada tahun 2015, volume ekspor karet sintetis ke China mengalami kenaikan kembali dengan total volume ekspor yaitu 26,82 ribu ton atau 52,24%. Pada tahun 2016, total volume ekspor karet sintetis ke China mencapai 59,82 ribu ton atau 65,87%. Dan pada tahun 2017, total volume ekspor karet sintetis ke China mencapai sebanyak 254,11 ribu ton atau 84,38% dari total volume keseluruhan ekspor karet sintetis Indonesia ke berbagai negara di dunia.

Grafik 4.4 Perkembangan Ekspor Karet Sintetis Indonesia Ke China Tahun 2013-2017 (ribu ton)



Sumber: BPS, Statistik Karet Indonesia

c) Penyebab Fluktuatif Ekspor Karet Indonesia ke China

Perkembangan ekspor karet Indonesia ke China selama lima tahun terakhir cenderung mengalami fluktuatif, seperti yang dapat kita lihat pada pembahasan diatas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya fluktuatif ekspor karet Indonesia ke China, yaitu faktor Internal dan faktor eksternal⁸³.

Faktor Internal

- Harga Karet Domestik

Harga adalah nilai yang harus dibayar oleh pembeli untuk pertukaran sesuatu. Dari jumlah permintaan dan penawaran untuk sesuatu yang diklaim oleh suatu negara sangat berpengaruh terhadap harga. Jika suatu barang mengalami

⁸³ Hajrah; Yealta " Den, 'Fluktuasi Ekspor Karet Alam Indonesia Ke Tiongkok Tahun 2012-2016', *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7.Vol. 7: Edisi I Januari-Juni 2020 (2020), 1–15 <<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/27829/26813>>.

kelebihan permintaan dapat berpengaruh terhadap kenaikan harga. Karena itu harga merupakan faktor penting dalam menentukan keseimbangan tingkat penawaran dan permintaan.

Harga karet domestik berpengaruh negatif terhadap jumlah ekspor karet, jika harga karet domestik naik atau meningkat maka jumlah ekspor karet akan menurun dan sebaliknya. Seperti pada tahun 2015 harga karet sebesar Rp. 10.852,/kg atau menurun sebesar 33,67% dibandingkan tahun 2014 yang harga karet sekitar Rp. 16.000,/kg. Kemudian pada tahun 2016 harga karet kembali naik meningkat menjadi Rp. 18.099,/kg. Pada tahun 2015 dengan menurunnya harga karet domestik, volume ekspor karet Indonesia menjadi positif, dengan total volume ekspor karet Indonesia menjadi 2,630,313, dan mengalami penurunan kembali menjadi 2,578,791 ton pada tahun 2016 karena harga karet domestik kembali meningkat. Dengan naik turunnya harga karet domestik tersebut sangat berpengaruh terhadap jumlah ekspor karet Indonesia ke seluruh dunia khususnya ke negara China. Salah satu penyebab naiknya harga karet domestik karena permintaan karet dalam negeri juga meningkat, jika permintaan dalam negeri meningkat dan tidak diiringi meningkatnya produksi maka akan berpengaruh negatif terhadap volume ekspor karet.

- **Produksi Karet Alam Domestik**

Produksi karet sangat berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Produksi karet alam Indonesia sangat penting terhadap jumlah volume ekspor karet alam Indonesia. Jika produksi karet meningkat maka akan meningkatkan juga volume ekspor, begitu juga jika mengalami penurunan produksi maka

volume ekspor juga akan menurun. Daya saing suatu negara akan meningkat jika ekspor suatu negara meningkat, maka dari itu hasil produksi sangat penting dalam peningkatan ekspor.

Volume ekspor karet Indonesia ke China tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dan penurunan. Meskipun berfluktuatif hanya saja pada beberapa tahun volume ekspor karet Indonesia ke China mengalami penurunan sekitar 2,98% pada tahun 2015 dari tahun sebelumnya. Dari Tahun 2013-2017 volume ekspor karet alam Indonesia ke China tertinggi pada tahun 2013 dengan total volume ekspor sekitar 511,70 ribu ton atau 18,94% dari total volume ekspor karet alam Indonesia keseluruhan dunia.

Produksi karet alam Indonesia masih menghadapi beberapa hambatan, misalnya, modal terbatas baik untuk membeli bibit unggul dan sarana produksi yang tak tertandingi. Salah hal yang dapat mendorong dalam peningkatan hasil produksi adalah perlu meningkatkan perawatan dan pemeliharaan tanaman karet.

Pada tahun 2013 produksi karet Indonesia mencapai 3,24 juta ton, pada tahun 2014 produksi karet Indonesia mengalami penurunan hanya mencapai 3,15 juta ton, pada tahun 2015 tambah mengalami penurunan yang hasil produksinya hanya mencapai sekitar 3,11 juta ton, dan tahun setelahnya itu mengalami kenaikan kembali, seperti pada tahun 2016 produksi karet kembali meningkat sekitar 3,35 juta ton dan pada tahun 2017 sekitar 3,68 juta ton. Peningkatan tersebut terjadi karena sepanjang tahun tersebut tanaman pohon karet di Indonesia dapat berproduksi dengan baik, dan setiap tahunnya luas area

perkebunan karet Indonesia juga mengalami peningkatan. Hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar kapasitas produksi yang dihasilkan maka ekspor juga semakin meningkat dan sebaliknya.

Faktor Eksternal

- Harga Karet Internasional

Selain harga domestik yang berpengaruh terhadap ekspor karet alam Indonesia, harga karet internasional juga sangat berpengaruh karena banyak dari negara lain yang menjadi pemasok karet yang menjadi pesaing bagi Indonesia seperti Thailand dan Malaysia, serta kualitas produk karet yang ditawarkan.

Tabel 4.6 Hasil Penghitungan Ekspor Karet Alam Negara Pesaing Utama ke Negara China Tahun 2013-2015 (Persentase)

Negara	Tahun		
	2013	2014	2015
Indonesia	16,86	13,87	10,22
Thailand	58,14	62,32	66,01
Malaysia	12,93	11,88	12,61
Vietnam	7,34	7,18	6,51

Sumber: Map Trade, diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa negara Thailand merupakan negara di ASEAN yang menjadi pengeksport karet alam pertama ke China pada rentang tahun 2013 hingga 2015 dan selalu mengalami kenaikan. Negara Indonesia dan Vietnam justru mengalami penurunan ekspor karet alam ke China dan negara Malaysia berfluktuatif. Selama

rentang tahun tersebut Indonesia berada diperingkat kedua sebagai negara pengeksport karet alam ke China.

Dari tahun 2013-2017 harga karet dunia terus mengalami penurunan sampai mencapai titik terendah pada Januari 2016 yaitu hanya mencapai 1,23 USD/kg. Pada bulan Februari 2016 harga karet kembali meningkat secara perlahan dan mencapai 2,23 USD/kg diakhir tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 harga karet dunia selalu mengalami kenaikan dan penurunan, bahkan harga tertinggi pada tahun 2017 hanya mencapai sekitar 2,71 USD/kg. Nilai tukar merupakan salah satu penyebab meningkat dan menurunnya harga karet Indonesia, jadi bukan hanya karena karet Indonesia kalah saing dari kualitas produk karet negara lain.

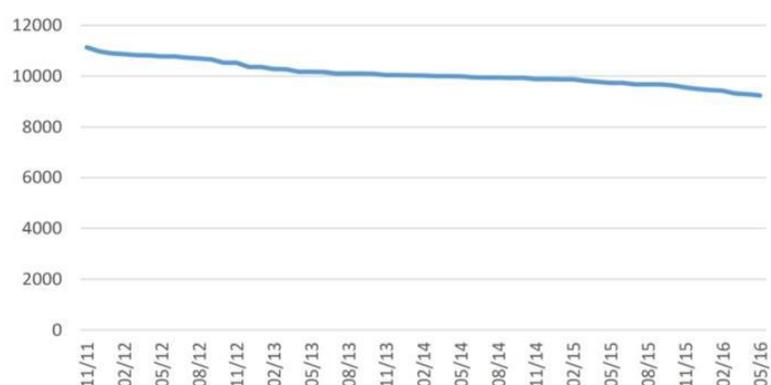
- Nilai Tukar Rupiah Indonesia terhadap Yuan China

Uang suatu negara dapat diperdagangkan atau ditukar dengan uang tunai satu negara sesuai dengan skala konversi yang ada di pasar tunai atau yang sering disebut sebagai pasar valuta asing. Jika suatu negara mengalami perubahan keadaan ekonomi serta sosial politik di suatu negara maka akan juga berdampak terhadap nilai tukar mata uang negara lainnya.

Hubungan antara kurs rill dan ekspor adalah semakin rendah kurs, semakin murah harga produk dalam negeri dibandingkan dengan produk-produk luar negeri, dan jika ekspor semakin banyak dan berdasarkan nilai tukar rill, jika tingkat harga domestik meningkat, maka kurs nominal akan turun. Artinya, jika kurs nominal Indonesia turun (terdepresiasi) maka semakin

banyak juga rupiah yang harus ditukarkan untuk mendapatkan Yuan China sehingga produk ekspor Indonesia akan semakin terlihat murah harganya dijual ke negara China karena untuk mendapatkan barang atau produk ekspor dari Indonesia, China hanya perlu menukarkan sedikit Yuan China untuk mendapatkan Rupiah Indonesia ketika Rupiah Indonesia terdepresiasi.

Grafik 6.5 Nilai Tukar Rupiah Terhadap Yuan.



Sumber : IMF, World Bank

Dari gambar grafik diatas terlihat bahwa nilai tukar rupiah terhadap Yuan China mengalami penurunan dan total nilai ekspor Indonesia ke China juga menunjukkan hal yang sama yaitu cenderung mengalami penurunan. Hal inilah menjadi salah satu penyebab menurunnya volume ekspor karet Indonesia ke China karena nilai tukar Rupiah Indonesia terhadap Yuan China menurun, kemudian diikuti total nilai ekspor Indonesia ke China juga menurun.

- Kebijakan *International Tripartite Rubber Council* (ITRC)

International Tripartite Rubber Council (ITRC) adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh negara-negara produksi karet alam di dunia, yaitu Thailand, Indonesia dan Malaysia yang

dibentuk pada tahun 2008. ITRC dibentuk karena terjadinya fluktuasi harga karet yang berdampak pada harga karet masing-masing negara sehingga berpengaruh terhadap pendapatan negara dan penurunan daya beli. Beberapa kebijakan ITRC dalam upaya untuk stabilisasi harga karet alam dunia, yaitu ; (1) *Supply Management Scheme* (SMS), yang merupakan skema dalam mengendalikan produksi karet melalui perluasan kebun, pembatasan pembukaan lahan baru, reduksi atau pengurangan tanaman karet, dan anjuran untuk tidak menyadap pohon karet dalam waktu-waktu tertentu, (2) *Agreed Export Tonnage Scheme* (AETS), merupakan skema pengendalian penawaran / supply karet alam di pasar dunia sehingga tidak terjadi kelebihan pasokan sementara permintaan menurun dengan melakukan pembatasan ekspor, (3) *Demand Promotion Scheme* (DPS), merupakan skema dengan tujuan *creating domestic demand* penawaran ekspor karet yang berkurang dan harga karet alam di pasar dalam negeri tidak berpengaruh langsung oleh perubahan keadaan perekonomian negara-negara pengimpor karet alam⁸⁴.

Kebijakan ITRC cukup berpengaruh terhadap ekspor karet namun tidak terlalu berdampak terhadap harga karet dan nilai tukar petani. Karena dampaknya tidak dapat berjalan dengan lama, hanya bertahan pada tahun 2013 dan terus menurun hingga 2015. Hal ini juga berpengaruh pada volume ekspor karet ke China walaupun tidak bertahan lama namun setelah diberlakukan kebijakan ITRC peningkatan volume ekspor cukup

⁸⁴ Linda Purwaningrat, Tanti Novianti, and Saktyanu Dermoredjo, 'Dampak Kebijakan International Tripartite Rubber Council (ITRC) Terhadap Kesejahteraan Petani Karet Indonesia', *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 4.2 (2020), 411–24 <<https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2020.004.02.18>>.

tinggi dari 437,800 ton ditahun 2012 menjadi sebesar 511,700 ton di tahun 2013 namun setelah itu terus menurun hingga tahun 2015. Pelaksanaan pembatasan produksi ini berlaku sehubungan dengan peningkatan biaya campuran karet alam di Indonesia, Malaysia dan Thailand dari USD 2,44/kg menjadi USD 2,70/kg pada awal Desember 2012 hingga Maret 2013.

- Daya Saing Komoditas Karet Alam

Selama tahun 2013-2017 China berada diperingkat ketiga sebagai negara tujuan ekspor karet alam Indonesia. Negara yang mengekspor karet alam ke China bukan hanya Indonesia tetapi ada beberapa negara pesaing seperti Thailand dan Malaysia. Meningkatnya daya saing terhadap ekspor karet ke negara China mempengaruhi volume ekspor karet Indonesia ke China. Walaupun demikian Indonesia masih memiliki peluang atau kesempatan untuk meningkatkan volume ekspor karet alamnya ke China. Beberapa penyebab atau faktor yang menyebabkan karet Alam Indonesia kalah saing dari negara lain, yaitu : produktivitas karet alam Indonesia masih rendah, negara lain telah banyak melakukan inovasi terutama yang terkait dengan iklim, negara lain lebih cepat dalam mengambil tindakan, serta kualitas daya saing ekspor karet Indonesia masih lemah dan lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setiap negara di dunia memiliki sumber daya alam, karakteristik, sosial, ekonomi dan lainnya yang berbeda-beda. Suatu keunggulan yang dimiliki negara lain, belum tentu dimiliki oleh negara yang lainnya, atau bahkan mungkin keunggulan tersebut juga dimiliki oleh negara lain, akan tetapi negara tersebut tidak dapat memproduksi dalam jumlah yang banyak sehingga belum mencukupi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Untuk memenuhi seperti yang dibutuhkan oleh negara tersebut, negara tersebut melakukan sebuah perdagangan internasional dengan negara lainnya untuk memudahkan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh negara tersebut dan sebaliknya.

Untuk lebih memudahkan perdagangan antar negara, banyak negara yang melakukan perdagangan antar kawasan, seperti negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang membentuk sebuah organisasi yang diberi nama ASEAN. Selain melakukan perdagangan dengan sesama anggota ASEAN, ASEAN membentuk sebuah kerjasama dengan negara lainnya, seperti ASEAN dengan China. Untuk meningkatkan kerjasama yang lebih erat dan lebih mudah dengan negara China khususnya dalam bidang perdagangan, ASEAN sepakat untuk membuat suatu perjanjian perdagangan dengan negara China. Perjanjian perdagangan antara ASEAN dan China disebut sebagai *ASEAN China Free Trade Agreement* (ACFTA). Didalam perjanjian ini meliputi berbagai macam produk perdagangan salah satu contohnya yaitu Karet.

Setelah ACFTA diterapkan, tidak terlalu efektif memberikan peran terhadap perdagangan ekspor karet Indonesia ke negara China. Walaupun belum terlalu memberikan dampak yang sangat signifikan, hal ini dapat dilihat dibagian pembahasan ekspor karet Indonesia ke negara China lumayan mengalami sedikit peningkatan dibandingkan sebelum penerapan ACFTA. Karet juga yang sebagai salah satu keunggulan komparatif Indonesia memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia. Karet merupakan komoditi hasil perkebunan yang juga mempunyai peran penting dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia, kontribusi karet terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia telah diuraikan di bab IV atau dibagian pembahasan khususnya dari tahun 2013-2017. Selain minyak dan gas, karet juga menjadi salah satu komoditi ekspor Indonesia yang cukup berperan sebagai penghasil devisa bagi negara.

5.2 Saran

Dengan melihat bahwa perjanjian ini belum terlalu memberikan dampak yang efektif dan masih ada beberapa hambatan lainnya. Maka penulis bermaksud memberikan beberapa saran yang semoga dapat dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan kualitas karet dan melakukan inovasi seperti mencoba berbagai percobaan dalam membentuk atau meneliti jenis klon-klon yang baru dalam menghasilkan bibit unggul karet yang berkualitas.
2. Pemerintah Indonesia juga lebih baik membuat sebuah kebijakan, seperti perbaiki regulasi ekspor karet supaya mampu menghadapi berbagai

macam faktor penyebab yang dapat mempengaruhi atau menjadi hambatan ekspor karet Indonesia khususnya ke negara China.

3. Indonesia sebagai negara yang mempunyai perkebunan karet terbesar di dunia juga harus berusaha menjadi pengeksport karet terbesar pertama di dunia, dengan cara berusaha menguasai pengeksport karet terutama keberbagai negara bukan hanya beberapa negara tujuan utama seperti yang dipaparkan dibagian pembahasan.
4. Pemerintah Indonesia berusaha cepat dan tanggap dalam menghadapi persoalan-persoalan atau masalah-masalah baru yang bisa menghambat perdagangan karet Indonesia.
5. Pemerintah Indonesia sebaiknya mengurangi penggunaan lahan perkebunan untuk pembangunan dan menjadikan produk perkebunan di fokuskan lagi sebagai salah satu sumber pendapatan Indonesia yang utama.
6. Pihak ACFTA juga perlu membuat kebijakan khusus dalam mengatasi berbagai macam hambatan dalam perdagangan antar sesama anggota, seperti misalnya menetapkan harga karet.

DAFTAR PUSTAKA

E-book :

Isaacs, Cimino- Cathleen D Rachel F. Fefer, *World Trade Organization : Overview and Future Direction World Trade Organization : Overview and Future Direction*, 2021

Jiangyu, Wang, *ASEAN-China Free Trade Agreement: Legal and Institutional Aspects, ASEAN-China Economic Relations*, 2019
<<https://doi.org/10.1355/9789812306562-009>>

Statistik Karet Indonesia 2015, 2016

Statistik Karet Indonesia 2016, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2017,
LIX

Statistik Karet Indonesia 2017, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2018,
LIX

Yusuf Kurniawan, Andy, and Ucik Mawarsari, *Statistik Karet Indonesia 2013*,
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2014, LIX

Yusuf Kurniawan, Andy, Ucik Mawarsari, and Lamiyanti, *Statistik Karet Indonesia 2014*, 2015

Book :

Jackson, Robert., and Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*

Journal :

" Den, Hajrah; Yealta, 'Fluktuasi Ekspor Karet Alam Indonesia Ke Tiongkok Tahun 2012-2016', *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7.Vol. 7: Edisi I Januari-Juni 2020 (2020), 1–15
<<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/27829/26813>>

Abdul Gani, and Taufiq A. Ra, 'Afta Merupakan Rezim Perdagangan Asean', *Jurnal Assyifa' Ilmu Keperawatan Islami*, 6.2 (2021), 1–12
<<https://doi.org/10.54460/jifa.v6i2.8>>

Atminingsih, Atminingsih, 'Perbanyak Bahan Tanam Karet Juvenil Di China', *Warta Per karetan*, 32.1 (2013), 1–6
<<https://doi.org/10.22302/ppk.wp.v32i1.30>>

Ayullah Kusuma, Azza, 'Dampak ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15.1 (2017), 1–14 <<https://doi.org/10.29259/jep.v15i1.8778>>

Baraza, Samson, 'International Relations: What Causes States to Pursue Free Trade', *SSRN Electronic Journal*, April, 2020, 1–9
<<https://doi.org/10.2139/ssrn.3517710>>

Darma Putra, I Dewa Gede, and I Wayan Sudirman, 'PENGARUH PRODUKSI, HARGA, KURS DAN TARIF 0 % TERHADAP EKSPOR CPO INDONESIA DALAM SKEMA ACFTA', *E-Jurnal EP Unud*, 3.No. 9 (2014), 395–402

Dr. Vladimir, Vega Falcon, 'Perdagangan Internasional', *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1.69 (2016), 5–24

Effendi, A. Masyhur, 'Mengenal Organisasi Regional Lewat Kesepakatan

Regional', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 16.6 (2017), 600
<<https://doi.org/10.21143/jhp.vol16.no6.1233>>

Fahreza Muhammad, 'Pengaruh Liberalisasi Perdagangan Internasional Terhadap Tingkat Kesejahteraan Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Pena*, 1 (2018), 77–85

Handoyo, Rossanto Dwi, Fiqy Rabbanisyah, Abdul Rahim Ridzuan, and Mohamad Idham Md Razak, 'Trade Liberalization and Labor Demand in Indonesia', *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10.5 (2020), 758–60 <<https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i5/7246>>

Hasoloan, Jimmy, 'Peranan Perdagangan Internasional Dalam Produktifitas Dan Perekonomian', *Jurnal Ilmiah Pend. Ekonomi*, 1.2 (2013), 102–12
<<https://media.neliti.com/media/publications/271659-peranan-perdagangan-internasional-dalam-71f683a0.pdf>>

Istiana, Finisuda Anding, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Di Indonesia Tahun 2013-2017', *Penelitian*, 1.1 (2018), 1–15
<<http://www.fao.org/3/l8739EN/i8739en.pdf>>
<<http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.01.003>>
<<http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.007>>
<<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.1224023>>
<<http://pdx.sagepub.com/lookup/doi/10>>

Kurniawati, Indah, 'Dampak ACFTA Terhadap Perdagangan Sektor Industri Dan Pertanian Indonesia (Studi Komparatif Indonesia-China Dan Indonesia-Vietnam)', *Eko-Regional*, 9.2 (2014), 114–24

- Levchenko, Andrei A., and Jing Zhang, 'The Evolution of Comparative Advantage: Measurement and Welfare Implications', *Journal of Monetary Economics*, 78 (2016), 96–111
<<https://doi.org/10.1016/J.JMONECO.2016.01.005>>
- Muslika, Ria, and Novi Diana Badrut Tamami, 'Daya Saing Komoditas Ekspor (Karet) Indonesia Ke China', *Agriekonomika*, 8.2 (2019), 194–205
<<https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v8i2.5426>>
- Nawawi, 'Asean-China Free Trade Agreement (Acfta) Dan Realitas Kesiapan Sumber Daya Manusia Indonesia', *Masyarakat Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, XXXVI.2 (2010), 33
<ejournal.lipi.go.id/index.php/jmi/issue/download/75/73>
- Perdana, Resty Puspa, 'Kinerja Ekonomi Karet Dan Strategi Pengembangan Hilirisasinya Di Indonesia', *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 37.1 (2020), 25
<<https://doi.org/10.21082/fae.v37n1.2019.25-39>>
- Prayuda, Rendi, Syafri Harto, and Desri Gunawan, 'Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep Dan Pendekatan Analisis)', *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2017, 97–111
<<https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index>>
- Purwaningrat, Linda, Tanti Novianti, and Saktyanu Dermoredjo, 'Dampak Kebijakan International Tripartite Rubber Council (ITRC) Terhadap Kesejahteraan Petani Karet Indonesia', *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 4.2 (2020), 411–24
<<https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2020.004.02.18>>
- Purwono, Rudi, Lilik Sugiharti, Rossanto Dwi Handoyo, and Miguel Angel

- Esquivias, 'Trade Liberalization and Comparative Advantage: Evidence from Indonesia and Asian Trade Partners', *Economies*, 10.4 (2022), 80
<<https://doi.org/10.3390/economies10040080>>
- Putri, Almaas Rahmawati, and Viani Puspita Sari, 'ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers Sebagai Rezim Perlindungan Pekerja Migran Berketerampilan Rendah Di ASEAN', *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3.2 (2021), 242–64
<<https://doi.org/10.24198/padmir.v3i2.31172.33497>>
- Sa'idy, I'id Badry, 'Analisis Daya Saing Komoditas Tekstil Dan Produk Tekstil Indonesia Di Amerika Serikat', *Economics Development Analysis Journal*, 2.4 (2013), 269–76
- Sari, Milya, 'Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA', *Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6.1 (2020), 41–53
- Sari, Yola Velinda, and Suhadak, 'Pengaruh ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) Terhadap Ekspor Komoditi Kelapa Sawit Karet Alam Indonesia Ke China', *Jurnal Administrasi Bisnis*, 44.1 (2017), 54–61
- Schumacher, Reinhard, 'Deconstructing the Theory of Comparative Advantage', *World Economic Review*, 2 (2013), 83–105
- Setiawan, Sigit, 'ASEAN-CHINA FTA: DAMPAKNYA TERHADAP EKSPOR INDONESIA DAN CINA ASEAN-China FTA : The Impacts on The Exports of Indonesia and China', *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 6.2 (2012), 1–27
- Siahaan, Rivaldo Ganti Diolan, 'Kedudukan Rezim Internasional Dalam Hukum Internasional Kontemporer (the Position of the International Regime in

Contemporary International Law)', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2.1 (2021), 59–65 <<https://media.neliti.com/media/publications/334507-the-position-of-the-international-regime-633e723c.pdf>>

Surugiu, Marius-Răzvan, and Camelia Surugiu, 'International Trade, Globalization and Economic Interdependence between European Countries: Implications for Businesses and Marketing Framework', *Procedia Economics and Finance*, 32.15 (2015), 131–38 <[https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01374-x](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01374-x)>

Tanious, Mina E., 'The Impact of Economic Interdependence on the Probability of Conflict between States', *Review of Economics and Political Science*, 4.1 (2019), 38–53 <<https://doi.org/10.1108/reps-10-2018-010>>

Prema Chandra Athukorala, 'Free Trade Agreements in the World Trade System: Substance and Semantics', *Foreign Trade Review*, 55.1 (2020), 13–20 <https://doi.org/10.1177/0015732519886771>

Rolianah, Wiwik Saidatur, 'PASAR BEBAS DI ERA GLOBALISASI DALAM Pendahuluan Pemasaran Global Bermula Di Inggris Dan Lebih Luas Lagi Di Besar Di Tingkat Global Hingga Tahun Ini . Jangkauan Pemasaran Yang Sekarang Diterapkan Di Seluruh Dunia Dan', *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8.2 (2018), 256–57

Markenis, B.S, 'The Theory and Practice Of', *Netherlands International Law Review*, 17.1 (2015), 1–4 <http://journals.cambridge.org/abstract_S0165070X00018921 How>

Indriyani, Indriyani, 'The Effect of ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) on Indonesia Export', *Etikonomi*, 15.2 (2016), 125–38

<<https://doi.org/10.15408/etk.v15i2.3331>>

Agustina Balik, 'Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri', *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Sasi*, 21.2 (2015), 41

Satya Dev Gupta, 'Comparative Advantage and Competitive Advantage: An Economics Perspective and a Synthesis', *Athens Journal of Business & Economics*, 1.1 (2022), 9–22 <https://doi.org/10.30958/ajbe.1-1-1>

Working Paper :

Atje, Raymond, and Arya B Gaduh, *Indonesia-China Economic Relations: An Indonesian Perspective, Economics Working Paper Series*, 2015, WPE052

P.Fitriani, Tiarma, Fandi Achmad, Rosa Situmorang, and Daniel P.Purba, *Indonesia-China Trade in ACFTA: Mapping of Competitiveness and Specialization, APINDO-ACTIVE Working Papers*, 2013

Generic :

'Dinamika Ekonomi Perdagangan Regional Asia Timur', 2010, pp. 1–21
<<http://eprints.umm.ac.id/31349/1/jiptummpg-gdl-s1-2011-hizbulwath-21976-BAB%2BI.pdf>>

Einstein, Joel, 'Economic Interdependence and Conflict – The Case of the US and China', *E-International Relations Students*, 2017, pp. 1–9

Marad, Anatol, 'Classification of International Trade', 2012, p. 1

Peterson, M. J., 'International Regimes as Concept', *E-International Relations*, 2012, pp. 1–6 <<https://www.e-ir.info/2012/12/21/international-regimes-as-concept/>>

Prasetyia, Ferry, 'Prospek Implementasi ACFTA Bagi Indonesia', 2010, pp. 1–2

Rachman, Tahar, 'Teori Ekonomi David Ricardo, Thomas Maltus Dan Jean Bepitiste Say', 2018, pp. 10–27

Ramon, Nanda, 'Pengertian_Perdagangan_Internasional_Def'

Rowley, Charles K., and Friedrich G. Schneider, 'Trade Liberalization and Globalization', *Readings in Public Choice and Constitutional Political Economy*, 2015, pp. 1–625 <<https://doi.org/10.1007/978-0-387-75870-1>>

Track, Normal, and Sensitive Track, 'Dokumen ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA)', 2016, p. 1

Dokumen Skripsi, 'Bab II Sejarah Dan Implementasi ACFTA', 2018. <https://eprints.umm.ac.id>

James Parlane, "Free Trade", *Berkshire Publishing*, s6-IV.105 (2011), 543
<https://doi.org/10.1093/nq/s6-IV.105.543-l>

Mohammad Ridwan, 'Keberlangsungan Rezim Perdagangan Bebas World Trade Organizations (WTO) Dengan Adanya Kebijakan Proteksi Pertanian Amerika Serikat', 2017, pp. 1–1

Thesis/Skripsi :

arikunto, 'Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Skripsi', *FIKOM UMN*,

2016 <http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/11/Daftar-isi-Methodologi-Penelitian_k1_restu.pdf>

septiani, ana, 'Kerjasama Indonesia-Jepang Melalui IJEPA Dalam Ekspor Karet Pada Tahun 2016-2019', 2018

wita silvia, Tjarsonoldjang, 'Dampak Kerjasama ACFTA Terhadap Ekspor Karet Indonesia-China (2010-2011)', 2011

Aisyah, Anis Siti, 'MODALITAS INDONESIA DALAM KERJASAMA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN – CHINA (ACFTA)', 2012
<<https://eprints.umm.ac.id/31309/>>

Maria Josephina Ruth Kezia Saudale, 'Banana Wars: Menginterpretasi Limit Rezim Perdagangan Bebas Multilateral Dalam World Trade Organization (WTO)', *Banana Wars*, 2021 <<https://doi.org/10.2307/j.ctv120qqss>>

Website :

Andriani, Renat Sofie, 'HARGA KARET 23 JANUARI: Stok China Turun, Karet Menguat', *Bisnis.Com*, 2017
<<https://market.bisnis.com/read/20170123/94/621870/harga-karet-23-januari-stok-china-turun-karet-menguat>>

export development board, Sri Lanka, 'Benefits and Uses of Natural Rubber - EDB Sri Lanka', 2021 <<https://www.srilankabusiness.com/blog/uses-advantages-of-natural-rubber.html>>

Fadila, Farah, 'Pengertian Dan Teori Perdagangan Internasional Menurut Para Ahli - Gramedia Literasi', 2021

<<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-teori-perdagangan-internasional/amp/>>

Hadiyantono, Tane, 'Perang Dagang AS-China Bisa Jadi Kesempatan Ekspor Karet', *Kontan.Co.Id* <<https://industri.kontan.co.id/news/perang-dagang-as-china-bisa-jadi-kesempatan-ekspor-karet>>

'ASEAN-CHINA', *Kementrian Perdagangan Republik Indonesia*, 2018
<<https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean-china>>

Asia-Pacific, Tilleke, and Gibbins, 'Antidumping, Countervailing Duties, and Safeguard Measures - Lexology', *LEXOLOGY*, 2014
<<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7837d574-033c-4974-a0e5-2774116f5ff6>>.

LAMPIRAN

1. Rules of Origin for ACFTA

Appendix 1

Annex 5

RULES OF ORIGIN FOR THE ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA

In determining the origin of products eligible for the preferential tariff concession pursuant to the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China (hereinafter referred to as "the Agreement"), the following Rules shall be applied:

Rule 1: Definitions

For the purpose of this Annex:

- (a) "a Party" means the individual parties to the Agreement i.e. Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic ("Lao PDR"), Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, the Socialist Republic of Vietnam and the People's Republic of China ("China").
- (b) "materials" shall include ingredients, parts, components, subassembly and/or goods that were physically incorporated into another good or were subject to a process in the production of another good.
- (c) "Originating goods" means products that qualify as originating in accordance with the provisions of Rule 2.
- (d) "production" means methods of obtaining goods including growing, mining, harvesting, raising, breeding, extracting, gathering, collecting, capturing, fishing, trapping, hunting, manufacturing, producing, processing or assembling a good.
- (e) "Product Specific Rules" are rules that specify that the materials have undergone a change in tariff classification or a specific manufacturing or processing operation, or satisfy an ad valorem criterion or a combination of any of these criteria.

Rule 2: Origin Criteria

For the purposes of this Agreement, products imported by a Party shall be deemed to be originating and eligible for preferential concessions if they conform to the origin requirements under any one of the following:

- (a) Products which are wholly obtained or produced as set out and defined in Rule 3; or
- (b) Products not wholly produced or obtained provided that the said products are eligible under Rule 4, Rule 5 or Rule 6.

Rule 3: Wholly Obtained Products

Within the meaning of Rule 2 (a), the following shall be considered as wholly produced or obtained in a Party:

- (a) Plant [1] and plant products harvested, picked or gathered there;
- (b) Live animals [2] born and raised there;
- (c) Products [3] obtained from live animals referred to in paragraph (b) above;
- (d) Products obtained from hunting, trapping, fishing, aquaculture, gathering or capturing conducted there;
- (e) Minerals and other naturally occurring substances, not included in paragraphs (a) to (d), extracted or taken from its soil, waters, seabed or beneath their seabed;
- (f) Products taken from the waters, seabed or beneath the seabed outside the territorial waters of that Party, provided that that Party has the rights to exploit such waters, seabed and beneath the seabed in accordance with international law;
- (g) Products of sea fishing and other marine products taken from the high seas by vessels registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party;

(h) Products processed and/or made on board factory ships registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party, exclusively from products referred to in paragraph (g) above;

(i) Articles collected there which can no longer perform their original purpose nor are capable of being restored or repaired and are fit only for disposal or recovery of parts of raw materials, or for recycling purposes [4]; and

(j) Goods obtained or produced in a Party solely from products referred to in paragraphs (a) to (i) above.

Rule 4: Not Wholly Produced or Obtained

(a) For the purposes of Rule 2(b), a product shall be deemed to be originating if:

(i) Not less than 40% of its content originates from any Party; or

(ii) If the total value of the materials, part or produce originating from outside of the territory of a Party (i.e. non-ACFTA) does not exceed 60% of the FOB value of the product so produced or obtained provided that the final process of the manufacture is performed within the territory of the Party.

(b) For the purposes of this Annex, the originating criteria set out in Rule 4(a)(ii) shall be referred to as the "ACFTA content". The formula for the 40% ACFTA content is calculated as follows:

Value of of Non-ACFTA materials origin	+	Value of materials Undetermined origin
<hr/>		
x 100 % < 60%		FOB Price
Therefore, the ACFTA content: 100% - non-ACFTA material = at least 40%		

(c) The value of the non-originating materials shall be:

(i) the CIF value at the time of importation of the materials; or

(ii) the earliest ascertained price paid for the materials of undetermined origin in the territory of the Party where the working or processing takes place.

- (d) For the purpose of this Rule, "originating material" shall be deemed to be a material whose country of origin, as determined under these rules, is the same country as the country in which the material is used in production.

Rule 5: Cumulative Rule of Origin

Unless otherwise provided for, products which comply with origin requirements provided for in Rule 2 and which are used in the territory of a Party as materials for a finished product eligible for preferential treatment under the Agreement shall be considered as products originating in the territory of the Party where working or processing of the finished product has taken place provided that the aggregate ACFTA content (i.e. full cumulation, applicable among all Parties) on the final product is not less than 40%.

RULE 6: PRODUCT SPECIFIC CRITERIA

Products which have undergone sufficient transformation in a Party shall be treated as originating goods of that Party. Products which satisfy the Product Specific Rules provided for in Attachment B shall be considered as goods to which sufficient transformation has been carried out in a Party.

RULE 7: MINIMAL OPERATIONS AND PROCESSES

Operations or processes undertaken, by themselves or in combination with each other for the purposes listed below, are considered to be minimal and shall not be taken into account in determining whether a good has been wholly obtained in one country:

- (a) ensuring preservation of goods in good condition for the purposes of transport or storage;
- (b) facilitating shipment or transportation;
- (c) packaging [5] or presenting goods for sale.

Rule 8: Direct Consignment

The following shall be considered as consigned directly from the exporting Party to the importing Party:

- (a) If the products are transported passing through the territory of any other ACFTA member states;
- (b) If the products are transported without passing through the territory of any non-ACFTA member states;
- (c) The products whose transport involves transit through one or more intermediate non-ACFTA member states with or without transshipment or temporary storage in such countries, provided that:
 - (i) the transit entry is justified for geographical reason or by consideration related exclusively to transport requirements;
 - (ii) the products have not entered into trade or consumption there; and
 - (iii) the products have not undergone any operation there other than unloading and reloading or any operation required to keep them in good condition.

Rule 9: Treatment of Packing

- (a) Where for purposes of assessing customs duties, a Party treats products separately from their packing, it may also, in respect of its imports consigned from another Party, determine separately the origin of such packing.
- (b) Where paragraph (a) above is not applied, packing shall be considered as forming a whole with the products and no part of any packing required for their transport or storage shall be considered as having been imported from outside the ACFTA when determining the origin of the products as a whole.

Rule 10: Accessories, Spare Parts and Tools

The origin of accessories, spare parts, tools and instructional or other information materials presented with the goods therewith shall be neglected in determining the origin of the goods, provided that such accessories, spare parts, tools and information materials are classified and collected customs duties with the goods by the importing member state.

RULE 11: NEUTRAL ELEMENTS

Unless otherwise provided, for the purpose of determining the origin of goods, the origin of power and fuel, plant and equipment, or machines and tools used to obtain the goods, or the materials used in its manufacture which do not remain in the goods or form part of the goods, shall not be taken into account.

Rule 12: Certificate of Origin

A claim that products shall be accepted as eligible for preferential concession shall be supported by a Certificate of Origin issued by a government authority designated by the exporting Party and notified to the other Parties to the Agreement in accordance with the Operational Certification Procedures, as set out in Attachment A.

Rule 13: Review and Modification

These rules may be reviewed and modified as and when necessary upon request of a Member State and may be open to such reviews and modifications as may be agreed upon by the AEM-MOFCOM.

Rule 14

In the case of consignments of products originating in the exporting Party and not exceeding US\$200.00 FOB, the production of a Certificate of Origin shall be waived and the use of simplified declaration by the exporter that the products in question have originated in the exporting Party will be accepted. Products sent through the post not exceeding US\$200.00 FOB shall also be similarly treated.

Rule 15

The discovery of minor discrepancies between the statements made in the Certificate of Origin and those made in the documents submitted to the Customs Authorities of the importing Party for the purpose of carrying out the formalities

for importing the products shall not ipso-facto invalidate the Certificate of Origin, if it does in fact correspond to the products submitted.

Rule 16

(a) The importing Party may request a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof.

(b) The request shall be accompanied with the Certificate of Origin concerned and shall specify the reasons and any additional information suggesting that the particulars given on the said Certificate of Origin may be inaccurate, unless the retroactive check is requested on a random basis.

(c) The Customs Authorities of the importing Party may suspend the provisions on preferential treatment while awaiting the result of verification. However, it may release the products to the importer subject to any administrative measures deemed necessary, provided that they are not held to be subject to import prohibition or restriction and there is no suspicion of fraud.

(d) The issuing Government authorities receiving a request for retroactive check shall respond to the request promptly and reply not later than six (6) months after the receipt of the request.

Rule 17

(a) The application for Certificates of Origin and all documents related to such application shall be retained by the issuing authorities for not less than two (2) years from the date of issuance.

(b) Information relating to the validity of the Certificate of Origin shall be furnished upon request of the importing Party.

(c) Any information communicated between the Parties concerned shall be treated as confidential and shall be used for the validation of Certificates of Origin purposes only.

SPECIAL CASES

Rule 18

When destination of all or parts of the products exported to a specified Party is changed, before or after their arrival in the Party, the following rules shall be observed:

- (a) If the products have already been submitted to the Customs Authorities in the specified importing Party, the Certificate of Origin shall, by a written application of the importer be endorsed to this effect for all or parts of products by the said authorities and the original returned to the importer. The triplicate shall be returned to the issuing authorities.
- (b) If the changing of destination occurs during transportation to the importing Party as specified in the Certificate of Origin, the exporter shall apply in writing, accompanied with the issued Certificate of Origin, for the new issuance for all or parts of products.

Rule 19

For the purpose of implementing Rule 8(c) of the ASEAN-China Rules of Origin, where transportation is effected through the territory of one or more non-ACFTA member states, the following shall be produced to the Government authorities of the importing Member State:

- (a) A through Bill of Lading issued in the exporting Member State;
- (b) A Certificate of Origin issued by the relevant Government authorities of the exporting Member State;
- (c) A copy of the original commercial invoice in respect of the product;
and
- (d) Supporting documents in evidence that the requirements of Rule 8(c) sub-paragraphs (i),(ii) and (iii) of the ASEAN-China Rules of Origin are being complied with.

Rule 20

(a) Products sent from an exporting Party for exhibition in another Party and sold during or after the exhibition into a Party shall benefit from the ASEAN-China preferential tariff treatment on the condition that the products meet the requirements of the ASEAN-China Rules of Origin provided it is shown to the satisfaction of the relevant Government authorities of the importing Party that:

- (i) an exporter has dispatched those products from the territory of the exporting Party to the country where the exhibition is held and has exhibited them there;
- (ii) the exporter has sold the goods or transferred them to a consignee in the importing Party; and
- (iii) the products have been consigned during the exhibition or immediately thereafter to the importing Party in the state in which they were sent for exhibition.

(b) For purposes of implementing the above provisions, the Certificate of Origin must be produced to the relevant Government authorities of the importing Party. The name and address of the exhibition must be indicated, a certificate issued by the relevant Government authorities of the Party where the exhibition took place together with supporting documents prescribed in rule 19(d) may be required.

(c) Paragraph (a) shall apply to any trade, agricultural or crafts exhibition, fair or similar show or display in shops or business premises with the view to the sale of foreign products and where the products remain under Customs control during the exhibition.

ACTION AGAINST FRAUDULENT ACTS

Rule 21

(a) When it is suspected that fraudulent acts in connection with the Certificate of Origin have been committed, the Government authorities concerned shall co-operate in the action to be taken in the territory of the respective Party against the persons involved.

(b) Each Party shall be responsible for providing legal sanctions for fraudulent acts related to the Certificate of Origin.

Rule 22

In the case of a dispute concerning origin determination, classification or products or other matters, the Government authorities concerned in the importing and exporting Member States shall consult each other with a view to resolving the dispute, and the result shall be reported to the other Member States for information.

Sumber : FTA Center.kemendag, Dokumen ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA)